



LAPORAN KETERCAPAIAN

SDGs

Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
2020



**LAPORAN KETERCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN 2019**



**BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN OKU SELATAN**

LAPORAN KETERCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019

Katalog	: -
ISBN	: -
Nomor Publikasi	: -
Ukuran Buku	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: x + 145 halaman
Naskah	: Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan
Penyunting	: Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan
Diterbitkan Oleh	: Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan

KATA PENGANTAR

Dalam era desentralisasi, peran pemerintah daerah untuk membangun daerahnya cenderung semakin meningkat. Paradigma “membangun daerah” telah bergeser menjadi “daerah membangun”. Sejalan dengan itu, peran pemerintah daerah sebagai perencana, pelaksana dan pemantau pembangunan daerah juga semakin meningkat, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pemetaan dan pemotretan kondisi pembangunan daerah, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia sangat penting untuk dilakukan.

Berkaitan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan berinisiatif membuat laporan ketercapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penerapan dan dukungan pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan dalam melaksanakan dan mensukseskan SDGs. Laporan ini memberikan informasi tentang TPB/SDGs itu sendiri dan kondisi capaian indikator-indikator yang terkait TPB/SDGs di Kabupaten OKU Selatan

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat membantu kita semua khususnya Pemda Kabupaten OKU Selatan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi masyarakat luas, aamin.

Muaradua, Oktober 2020
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

NATALION, S.STP.,M.Si
NIP. 197812251997111001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vii
Pendahuluan	1
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.....	5
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	13
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	21
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	29
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	37
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	41
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	51
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	55

	Halaman
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	65
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	69
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	75
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjuta.....	79
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.....	83
Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	87
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	93
Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	101
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	105
Pencapaian Indikator TPB / SDGs Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	
Pilar 1. Pembangunan Sosial	113
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	113
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	116

	Halaman
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	117
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	121
Tujuan 5. Kesenjangan Gender	123
Target dan Pencapaian Indikator TPB / SDGs Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	
Pilar 2. Pembangunan Ekonomi	125
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	125
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	126
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	128
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	129
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	130
Target dan Pencapaian Indikator TPB / SDGs Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	
Pilar 3. Pembangunan Lingkungan	133
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	133
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	136
Tujuan 12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	138
Tujuan 13. Perubahan Iklim	139
Tujuan 14. Ekosistem Laut	140
Tujuan 15. Ekosistem Daratan	141
Target dan Pencapaian Indikator TPB / SDGs Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	
Pilar 4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	143
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	143

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Proporsi penduduk Kabupaten OKU Selatan yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2007 – 2019	5
Gambar 1.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, tahun 2019	7
Gambar 1.3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2019	8
Gambar 1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tahun 2019	9
Gambar 1.5. Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran tahun 2018	10
Gambar 1.6. Persentase rumah tangga kelompok 40 persen pengeluaran terendah menurut sumber penerangan utama	11
Gambar 2.1. Luas panen dan produksi padi di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018 – 2019	17
Gambar 3.1. Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang proses kelahirannya ditolong tenaga kesehatan terlatih tahun 2015-2017	22
Gambar 3.2. Jumlah penduduk meninggal pada umur kurang dari lima tahun, 2016 - 2019	23
Gambar 3.3. Persentase penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang mendapat imunisasi lengkap pada tahun 2019	24

	Halaman
Gambar 3.4. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, 2019	25
Gambar 3.5. Jumlah peserta KB aktif tahun 2015 - 2019.....	26
Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 – 2019	28
Gambar 4.2. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur diatas 15 tahun di Kabupaten OKU Selatan tahun 2010-2019.....	31
Gambar 4.3. Jumlah sekolah, guru, dan murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten OKU Selatan, 2019/2020.	32
Gambar 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten OKU Selatan tahun 2009 – 2019	33
Gambar 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 – 2019	34
Gambar 4.6. Persentase angka melek aksara penduduk berusia diatas 15 tahun di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019	35
Gambar 5.1. Komposisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Selatan menurut Jenis Kelamin tahun 2019.....	39
Gambar 6.1. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih di kabupaten OKU Selatan tahun 2011-2015	41
Gambar 6.2. Jumlah pelanggan air di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019.....	41
Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2019	44

	Halaman
Gambar 6.4. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten OKU Selatan 2016 – 2019 .	45
Gambar 7.1. Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik di kabupaten OKU Selatan tahun 2011-2015.....	51
Gambar 7.2. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten OKU Selatan 2015 – 2019	51
Gambar 8.1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019.....	55
Gambar 8.2. PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten OKU Selatan tahun 2017 – 2019 (Juta rupiah).....	56
Gambar 8.3. Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin tahun 2017-2019.....	58
Gambar 8.4. Penduduk berumur 15-19 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin tahun 2019.....	60
Gambar 8.5. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2013-2019	63
Gambar 9.1. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten OKU Selatan, 2019	66
Gambar 9.2. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten OKU Selatan, 2019	66
Gambar 9.3. Distribusi persentase PDRB menurut lima lapangan usaha tertinggi di Kabupaten OKU Selatan, 2019.....	67
Gambar 9.4. Persentase nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten OKU Selatan, 2015-2019.....	67

	Halaman
Gambar 9.5. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019	67
Gambar 10.1. Koefisien gini Kabupaten OKU Selatan tahun 2011-2019	70
Gambar 10.2. Persentase penduduk miskin di Kabupaten OKU Selatan tahun 2007-2019.....	70
Gambar 11.1 Jumlah bencana alam dan korban bencana alam di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 - 2018	71
Gambar 16.1. Jumlah dan persentase korban kekerasan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019.....	101
Gambar 16.2. Jumlah dan persentase pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui di Kabupaten OKU Selatan, 2016-2019.....	102
Gambar 16.3. Jumlah dan persentase anggota DPRD berjenis kelamin perempuan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019	102
Gambar 16.4. Jumlah dan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019	103
Gambar 16.2. Jumlah dan persentase pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui di Kabupaten OKU Selatan, 2016-2019.....	102
Gambar 17.1. Proporsi penduduk OKU Selatan yang mengakses internet pada tahun 2019.....	105
Gambar 17.2. Target dan Realisasi Persentase konsumen yang puas dengan kualitas data BPS tahun 2016-2019.....	107

	Halaman
Gambar 17.3. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama tahun 2019	108
Gambar 17.4. Jumlah metada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun oleh BPS tahun 2018-2019	109
Gambar 17.5. Persentase publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu, tidak tepat waktu dan batal rilis tahun 2017-2019	110

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Sustainable Development Goals)



Pendahuluan

Latar Belakang

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Para pemimpin negara dunia yang menjadi anggota PBB telah menyetujui dan mengadopsi SDGs sebagai agenda pembangunan global yang baru semenjak September 2015 hingga 2030. SDGs memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan MDGs yang hanya menetapkan delapan tujuan. Terdapat tujuh belas tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan hukum tata kelola (Sekretariat SDGs Indonesia).

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia didukung oleh semua jajarannya hingga level Kabupaten/Kota. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang turut berkontribusi dalam penyusunan Indikator SDGs nasional. Sejumlah langkah telah ditempuh Kabupaten OKU Selatan sampai dengan akhir 2019 antara lain: (i) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, dan (ii) mempersiapkan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Kabupaten OKU Selatan.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten OKU Selatan. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “*No One Left Behind*” yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs Kabupaten OKU Selatan.

Perlunya Memotret Kondisi Capaian SDGs

Untuk melihat Laporan capaian pembangunan berkelanjutan, publikasi ini mencoba menyajikan sejumlah indikator SDGs yang tersedia di Kabupaten OKU Selatan untuk masing-masing tujuan dan target. Penyajian Laporan capaian pembangunan berkelanjutan Kabupaten OKU Selatan ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam tahap perencanaan dan implementasi SDGs khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah untuk pelaksanaan SDGs Kabupaten OKU Selatan. Selain itu, gambaran capaian dari pembangunan berkelanjutan ini juga dapat digunakan sebagai *benchmark* dalam melihat kemajuan atau *progress* di masa mendatang.

Sejumlah indikator SDGs yang disajikan dan dianalisis dalam publikasi ini difokuskan pada indikator SDGs yang datanya tersedia di Kabupaten OKU Selatan khususnya di Badan Pusat Statistik dan Bappeda Litbang serta beberapa instansi lain yang berhasil dikompilasi. Sejumlah indikator SDGs lain yang mungkin sudah tersedia belum disajikan dalam publikasi ini karena belum bisa dikompilasi/dihitung. Sebelum analisis dilakukan terhadap setiap indikator SDGs yang tersedia, kiranya perlu membahas secara ringkas beberapa aspek penting terkait dengan persiapan pelaksanaan SDGs Kabupaten OKU Selatan antara lain

pemetaan kesesuaian antara SDGs dengan prioritas pembangunan nasional dan pemetaan ketersediaan indikator SDGs Kabupaten OKU Selatan.

Tujuan Penyusunan Publikasi

Secara umum tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten OKU Selatan berdasarkan data yang tersedia. Secara detil, publikasi ini disusun untuk:

1. Menyajikan indikator-indikator SDGs yang tersedia di Kabupaten OKU Selatan khususnya Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi lain.
2. Untuk mengetahui posisi capaian pembangunan berkelanjutan pada setiap tujuan SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang tersedia.
3. Mendorong kepada para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Kabupaten OKU Selatan.

Sistematika Penulisan

Penulisan laporan SDGs ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan dan analisis tentang Laporan pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan indikator di masing-masing tujuan dan target serta pemetaan target dan pencapaian indikator SDGs pada masing-masing pilar.



TUJUAN 1

Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1

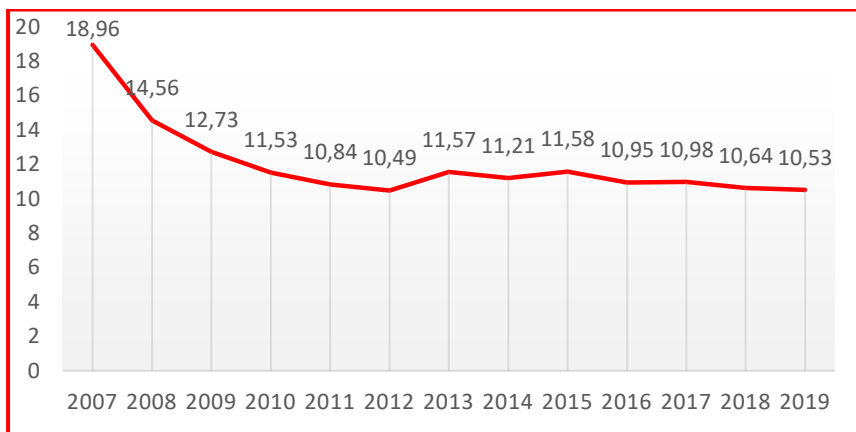
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs Kabupaten OKU Selatan yaitu pemerintah memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional

Indikator 1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Gambar 1.1. Proporsi penduduk Kabupaten OKU Selatan yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2007 – 2019



Proporsi penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2019 terkecil dalam tujuh tahun terakhir.

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik

Menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan dari tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah menunjukkan hasil yang positif. Usaha pemerintah beserta *stakeholder* lainnya dalam menjalankan program dalam pengentasan kemiskinan tersebut perlu diapresiasi terlihat bahwa di Kabupaten OKU Selatan, proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar 11,57 persen dan di tahun 2019 proporsinya menurun menjadi 10,53 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berada di jalur yang benar (*on the right track*) sehingga pemerintah perlu mempertahankan konsistensi tren penurunan tersebut. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa target SDGs untuk indikator ini belum tercapai. Upaya yang lebih terarah dalam penghapusan kemiskinan agar tujuan 1 bisa tercapai pada tahun 2030, atau setidaknya dalam waktu dekat bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah angka sepuluh persen seperti yang telah dicapai pada tingkat kemiskinan di negara Indonesia secara nasional.

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

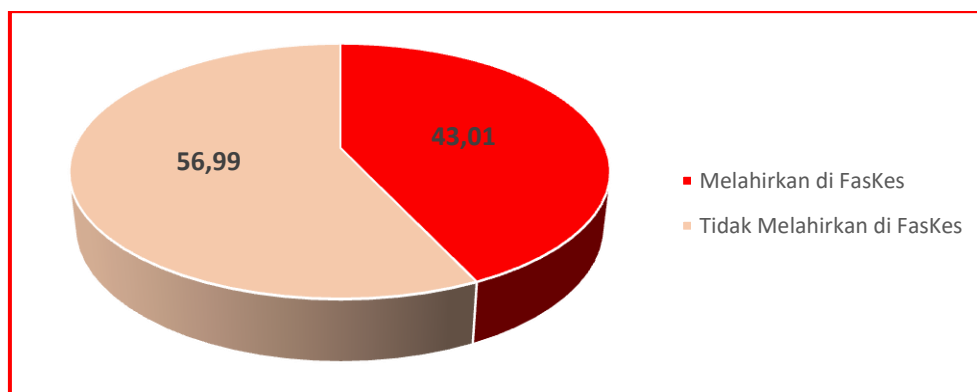
Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (40% berpendapatan rendah). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan mikro

Indikator 1.4.1.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Gambar 1.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, tahun 2019



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, Badan Pusat Statistik

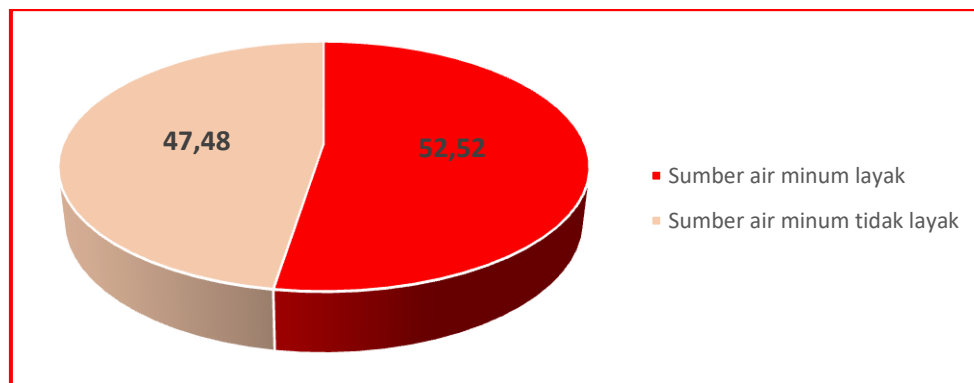
Proses kelahiran atau persalinan di fasilitas kesehatan dapat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Pada fasilitas kesehatan tersedia perlengkapan dan tenaga kesehatan yang siap menolong sewaktu-waktu bila terjadi komplikasi persalinan. Menurut BPS melalui hasil SUSENAS tahun 2019, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan hanya sebesar 43 persen saja.

Selain masih kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan, salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan adalah tingkat ekonomi rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan. Dari hasil survei yang sama menunjukkan bahwa

hanya satu dari empat penduduk rentan (penduduk yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran empat puluh persen terendah) yang proses kelahiran terakhirnya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh kelompok miskin dan rentan juga bisa disebabkan belum semua keluarga miskin menerima kartu jaminan kesehatan untuk berobat di fasilitas kesehatan.

Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Gambar 1.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2019



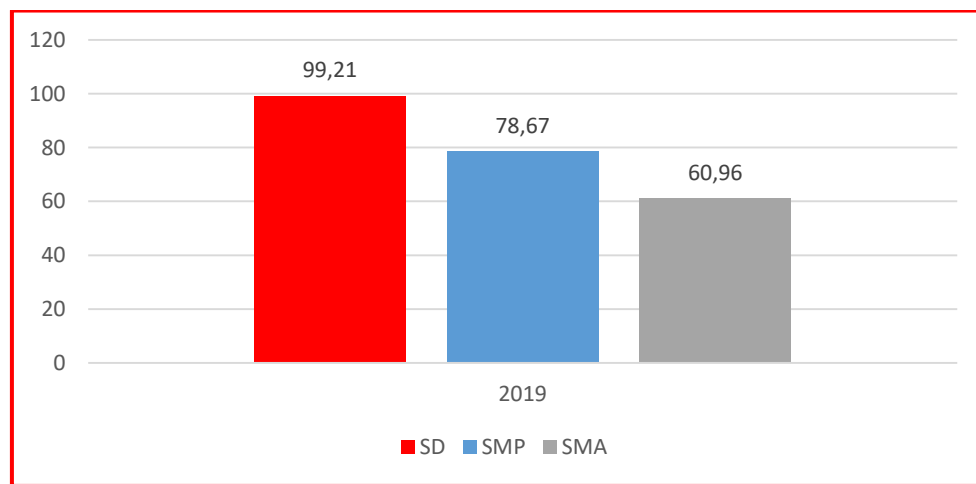
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, Badan Pusat Statistik

Ketersediaan sumber air minum yang layak merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak, bila sumber air minum yang layak tidak tersedia maka anak-anak akan rentan terkena berbagai macam penyakit khususnya diare. Hal ini akan membuat anak-anak sulit untuk tumbuh dan berkembang serta mencapai potensi terbaik mereka dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kondisi ketersediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten OKU Selatan harus lebih diperhatikan lagi karena di tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak baru separuh dari seluruh penduduk di Kabupaten OKU Selatan.

Indikator 1.4.1.(g-i) Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk menurut jenjang pendidikan tahun 2019

Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global. Di Kabupaten OKU Selatan, pada tahun 2019, Angka Partisipasi Murni penduduk jenjang pendidikan Sekolah Dasar telah menembus angka 99,21 persen, itu artinya diantara hanya ada satu diantara 500 penduduk berusia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah pada level Sekolah Dasar.

Gambar 1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk menurut jenjang pendidikan tahun 2019



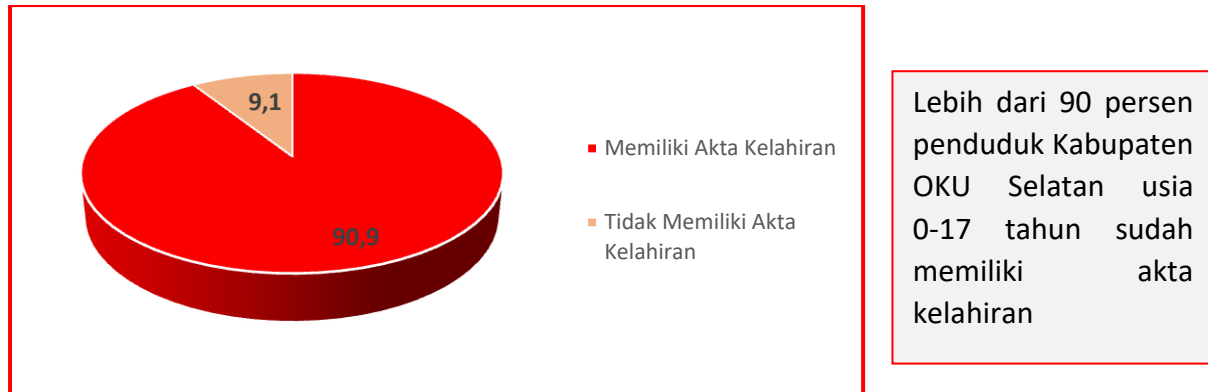
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, Badan Pusat Statistik

Indikator 1.4.1.(j) Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Pada tahun 2018, lebih dari 90 persen anak-anak di Kabupaten OKU Selatan berusia 0 – 17 tahun sudah tercatat identitasnya atau sudah memiliki akta kelahiran, dengan dicatat identitasnya dalam akta kelahiran secara *dejure* keberadaannya dianggap ada oleh negara. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial bagi anak-anak Kabupaten OKU Selatan. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta

diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Gambar 1.5 Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran tahun 2018

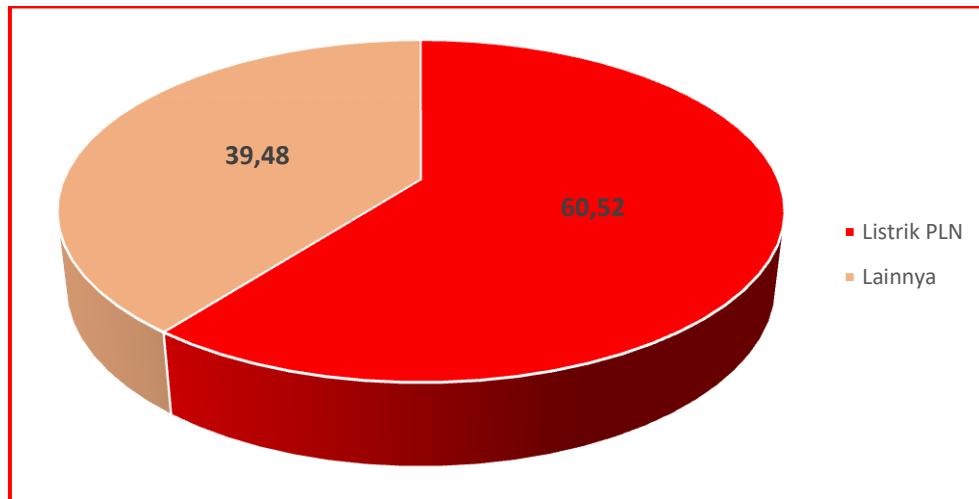


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, Badan Pusat Statistik

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk menndapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian property atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Indikator 1.4.2 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik

Gambar 1.6 Persentase rumah tangga kelompok 40 persen pengeluaran terendah menurut sumber penerangan utama



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, Badan Pusat Statistik

Pada jaman modern seperti saat ini listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari listrik dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia dari mulai sebagai sumber penerangan lampu dirumah-rumah sampai dengan sebagai sumber energi penggerak mesin-mesin industri, sehingga tanpa ada listrik dapat membuat roda perekonomian menjadi macet. Ketersediaan listrik tidak menjamin semua lapisan masyarakat dapat menikmati aliran listrik. Bila dilihat perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik diatas, baru 60,52% penduduk Kabupaten OKU Selatan yang menikmati listrik.



TUJUAN 2

Tanpa Kelaparan

Tujuan 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang di manapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya pertanian secara luas berkelanjutan. Hal tersebut mencakup pengembangan produktivitas dan pemasukan petani kecil dengan mendorong kesamaan luas lahan, teknologi dan penjualan, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dan budidaya yang terus menerus. Hal ini membutuhkan peningkatan investasi melalui kerjasama internasional untuk mendukung kapasitas produksi pertanian negara berkembang.

Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun

Indikator 2.1.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di mana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Ketidalcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Karena pertimbangan konsep dan definisi yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau group individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished*.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidalcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.

Indikator 2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Indikator ini mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten diukur berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/ FIES*) berdasarkan referensi global.

Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali.

Skala ini dapat memperlihatkan perbedaan tingkat kerawanan pangan berdasarkan pengalaman dalam mengakses pangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan status akses pangan perempuan dalam rumah tangga.

Pemerintah dapat menggunakan skala ini untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara simpel, mudah, dan tepat waktu dan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat. Skala ini juga berguna untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan terkait akses terhadap pangan.

Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manusia

Indikator 2.2.1. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. *Stunting* pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. *Stunting* pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak dan bukti menunjukkan bahwa efek dari *stunting* pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu, anak yang mengalami *stunting* beresikih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Indikator 2.2.2. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Balita yang menderita *wasting* (kurus/sangat kurus) sangat rawan terhadap penyakit infeksi dan memiliki resiko kematian lebih besar. Penyebab langsung dari *wasting* adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Cara untuk mengatasi itu harus dilakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang. Secara epidemiologis batas normal prevalensi *wasting* yang menyebabkan masalah kesehatan adalah <5%.

Anak balita yang menderita obesitas memiliki resiko penyakit degenerative dan penyakit komplikasi yang lain. Penyebabnya adalah pola makan dengan gizi yang tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik.

Indikator 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

Pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia kurang dari 6 bulan merupakan pemenuhan hak bayi yang sangat terkait dengan komitmen ibu dan dukungan keluarga serta lingkungan sekitar. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit (diare dan radang paru), meningkatkan kondisi kesehatan jangka pendek dan panjang, selain itu bermanfaat mempercepat pemulihan bila sakit.

Pada tahun 2019, dari seluruh penduduk berusia dua tahun di Kabupaten OKU Selatan, 96,88 persen diantaranya pernah diberikan ASI dengan rata-rata pemberian ASI selama kurang lebih sepuluh bulan.

Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian

Indikator 2.3.1 Ketersediaan pangan komoditas padi, jagung, dan kedelai

Indikator ini merupakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dengan arah kebijakan umum ketahanan pangan yang salah satunya dengan pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, dengan strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri. Begitu pula untuk komoditas lainnya, sebaiknya pemerintah berusaha untuk meningkatkan kembali produktivitas bagi setiap komoditas dengan berbagai program ataupun kebijakan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 2.1. Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018 – 2019

	2018	2019
Luas Panen (Hektar)	7.218,88	7.205,87
Produksi (Ton)	32.129,07	37.418,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

Indikator 2.3.2 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat

Indikator 2.3.2.(a) Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan

Indikator 2.3.2.(b) Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu

Dengan indikator ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan usaha sektor pertanian dan sektor perikanan khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu. Perkembangan kedua sektor usaha tersebut diharapkan dapat merangsang tingkat produktivitas produk pertanian melalui pendekatan yang lebih mutakhir serta meningkatkan pendapatan terutama masyarakat dari sektor pertanian dan terutama masyarakat di wilayah perdesaan.

Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan

Indikator 2.4.1 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator 2.4.1.(a) Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan

Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional

Indikator 2.5.1 Varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas ke masyarakat

Varietas unggul merupakan varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan SK Menteri Pertanian. Dengan varietas unggul produksi pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit dan cekaman iklim. Indikator ini bermanfaat untuk merespon perubahan lingkungan dan iklim, karena varietas unggul dan benih induknya tersimpan dengan baik dalam Bank Gen. Tercapainya indikator ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Indikator 2.5.2 Proporsi hewan ternak dan sejenisnya diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan

Suatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (*critical*), kritis dipertahankan (*critical-maintained*), terancam punah (*endangered*) atau hampir punah yang dipelihara (*endangered-maintained*). Hewan ternak yang berada pada klasifikasi berisiko berada pada kondisi yang mengarah pada kehilangan sumber daya genetik ternak tersebut. Indikator ini berupaya untuk meningkatkan jumlah rumpun hewan ternak sampai tidak berisiko sehingga dapat terjamin keberadaannya.



TUJUAN 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan 3 berupaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak; mengakhiri epidemi HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit tropis; mengurangi penyakit tidak menular dan environmental; mencapai cakupan kesehatan universal; dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau serta obat-obatan dan vaksin yang efektif. Para pemimpin dunia berkomitmen untuk mendukung penelitian dan pengembangan, meningkatkan pembiayaan kesehatan, dan memperkuat kapasitas semua negara untuk mengurangi dan mengelola resiko kesehatan.

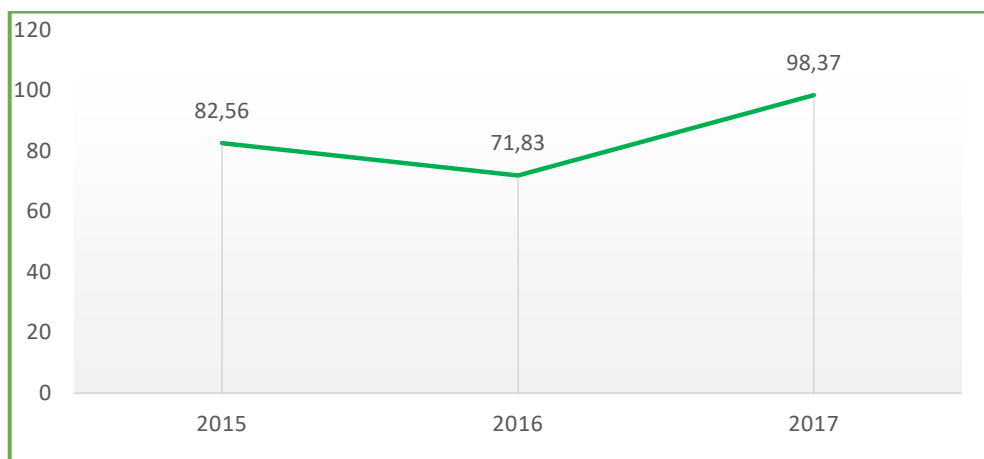
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

Indikator 3.1.2 Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong tenaga kesehatan terlatih

Indikator ini berkaitan dengan indikator AKI karena bertujuan mengurangi resiko kematian ibu. Menurut data Susenas, kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Persentasenya sudah melebihi 80 persen, bahkan pada tahun 2015 mencapai 91,51 persen. Namun demikian peningkatan proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tersebut belum mampu menurunkan AKI yang masih tetap tinggi. Persalinan ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga harus memahami cara menolong persalinan secara bersih dan aman, seperti yang tertuang dalam program *Safe Motherhood*. Program *Safe Motherhood* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman. Tujuan utamanya untuk menurunkan

angka kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin, nifas serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi (Safrudin, dkk, 2009).

Gambar 3.1. Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang proses kelahirannya ditolong tenaga kesehatan terlatih tahun 2015-2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik

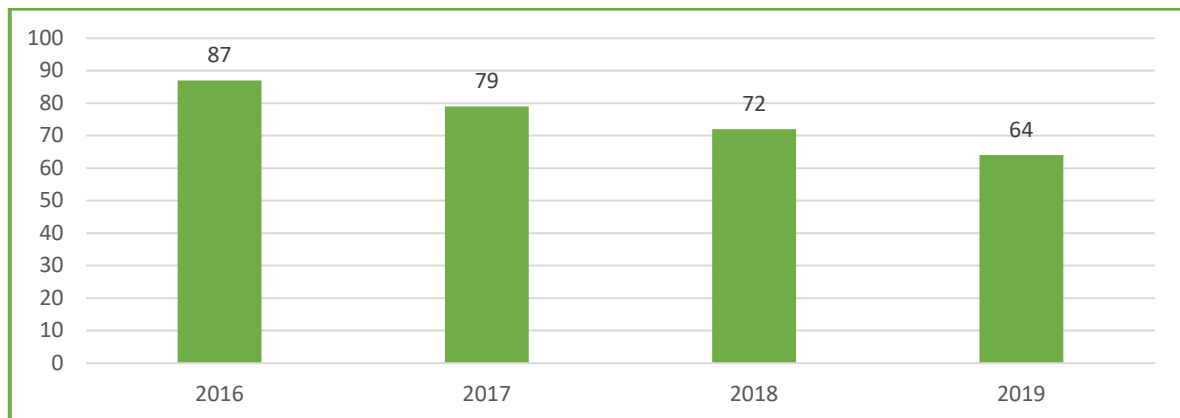
Disamping peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan, para ibu juga perlu diberi edukasi pengetahuan, sehingga mereka sadar dan mampu menjaga kesehatannya. Pendidikan ibu berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam mengakses informasi yang terkait dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu. Masih banyak ibu dengan pendidikan rendah terutama yang tinggal di perdesaan yang menganggap bahwa kehamilan dan persalinan adalah kodrat wanita yang harus dijalani sewajarnya tanpa memerlukan perlakuan khusus (pemeriksaan dan perawatan). Selain itu pengaruh budaya setempat juga masih sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan ibu dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu. Keputusan yang diambil tidak jarang didasari atas pertimbangan faktor sosial budaya dan faktor ekonomi.

Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000

Indikator 3.2.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatan. Data indikator ini didapat dari catatan Dinas Kesehatan mengenai jumlah kematian balita dan kelahiran hidup.

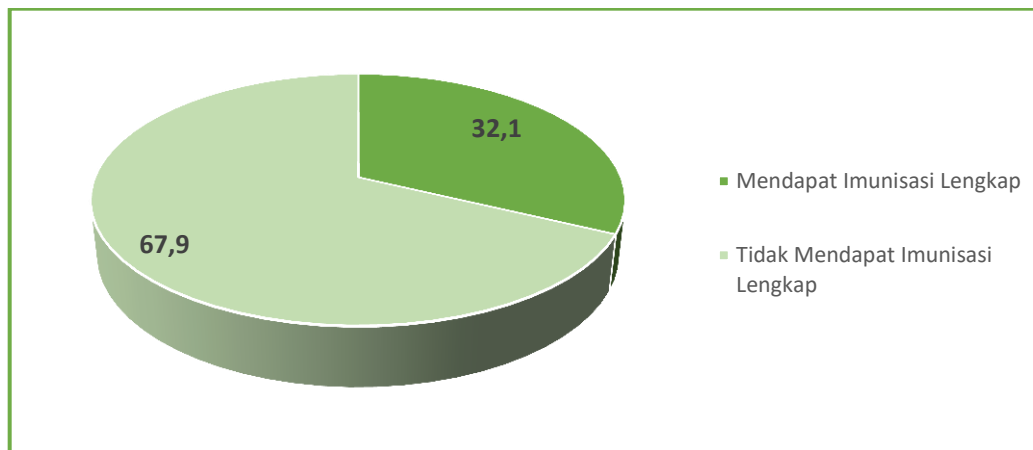
Gambar 3.2. Jumlah penduduk meninggal pada umur kurang dari lima tahun, 2016 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan

Indikator 3.2.2.(b) Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Gambar 3.3. Persentase penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang mendapat imunisasi lengkap pada tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019, baru sekitar 32,1 persen balita di Kabupaten OKU Selatan yang mendapat imunisasi lengkap. Angka ini masih cukup jauh dari target yang ditentukan. Meski begitu, 82,63 persen dari balita tersebut sudah memiliki Kartu Imunisasi. Hal ini mengindikasikan masyarakat di Kabupaten OKU Selatan sudah memiliki pemahaman yang baik akan imunisasi. Untuk mencapai target yang ditentukan, yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi terus menerus mengenai program imunisasi dan memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

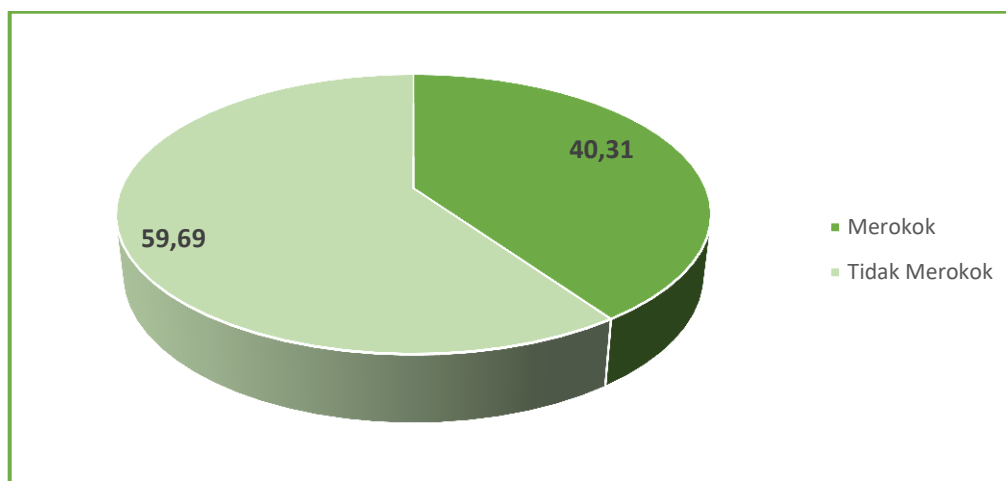
Indikator 3.3.1-3 Kejadian HIV, TB dan Malaria per 1.000 Orang

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, pada tahun 2019, masih terdapat kasus HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten OKU Selatan dengan jumlah kasus masing-masing 3, 715, dan 338 kasus.

Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan

Indikator 3.4.1.(a) Proporsi merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun

Gambar 3.4 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut BPS, pada tahun 2019, ada 40,31 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengonsumsi rokok dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap sebanyak 89 buah per minggu atau sekitar 12-13 batang rokok per hari.

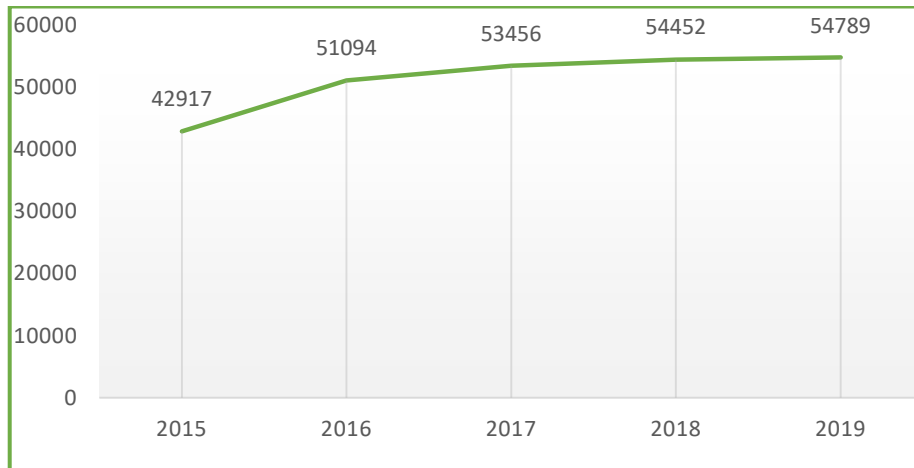
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

Indikator 3.7.1 Proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Alat kontrasepsi metode modern

terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL).

Gambar 3.5. Jumlah peserta kb aktif tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan Perlindungan Anak

Menurut data Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan Perlindungan Anak, jumlah peserta KB sejak tahun 2015 di Kabupaten OKU Selatan selalu mengalami peningkatan. Bahkan menurut hasil susenas tahun 2018, pada tahun 2018 sudah ada 81,73 persen perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang sudah pernah atau sedang menggunakan alat/cara KB. Untuk memenuhi target 3.7 terkait akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk KB ini, dibutuhkan peran pemerintah untuk mewujudkannya, terutama dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya.

Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah

Target 3.9 ini terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator 3.9.1 Angka kematian akibat tangga dan polusi udara, ambien, indikator 3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis, serta indikator 3.9.3 Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja. Indikator 3.9.1 dan indikator 3.9.2 belum bisa disediakan datanya Kabupaten OKU Selatan dan belum ada dalam target nasional (RPJMN 2015-2019), sehingga menjadi indikator global yang harus dikembangkan.

Untuk indikator 3.9.3 juga belum dapat disediakan datanya, sehingga untuk memenuhi ketersediaan datanya didekati dengan indikator nasional, yaitu angka kematian akibat keracunan. Indikator ini digunakan untuk melihat kecenderungan angka kematian akibat keracunan dan penyebabnya. Dengan demikian dapat disusun kebijakan, program dan kegiatan pencegahan yang lebih baik.

Angka kematian akibat keracunan dirumuskan menjadi jumlah kematian akibat keracunan dibagi dengan jumlah kematian seluruhnya dikalikan dengan 100 persen. Sumber data dapat diperoleh dari Balitbang melalui Sample Registrasion System (SRS), Kementerian Kesehatan. Untuk penyajian publikasi saat ini indikator 3.9.3 belum dapat disajikan karena belum dikompilasi.



TUJUAN 4

Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Tujuan 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.

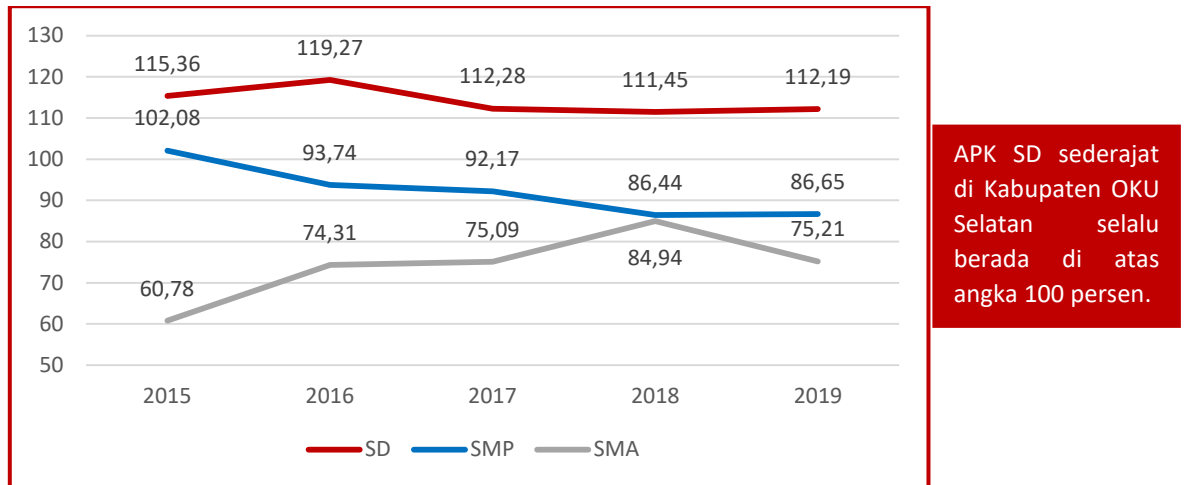
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

Indikator 4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika

Indikator ini dihitung sebagai jumlah anak-anak dan orang muda di akhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum (membaca dan berhitung), dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai pemantauan mutu pendidikan karena merupakan ukuran langsung dari hasil belajar yang dicapai dalam dua bidang studi pada akhir tingkat pendidikan yang relevan. Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karena data belum diperoleh, data yang disajikan adalah data untuk indikator nasional sebagai indikator proksi.

Indikator 4.1.1(d-f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat

Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 – 2019

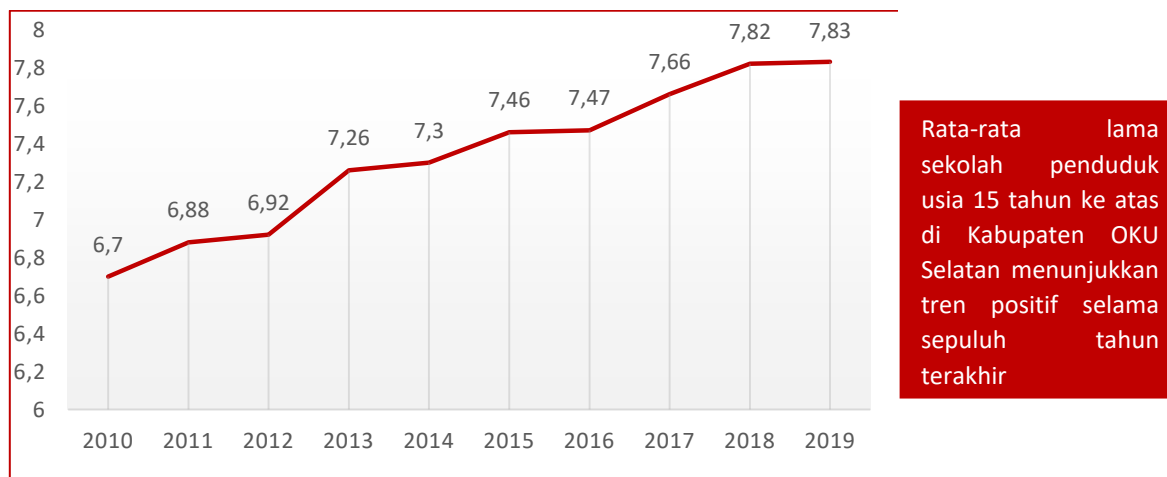


Sumber: Susenas KOR, Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2015-2019, APK SD/MI/ sederajat selalu melebihi angka seratus, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang bukan berusia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/MI/ sederajat. Dari situ terlihat bahwa kapasitas sistem pendidikan dasar sudah cukup untuk menampung siswanya. Tidak hanya itu, ketimpangan APK SD/MI/ sederajat antar daerah tempat tinggal dan antar jenis kelamin tidak terlihat secara signifikan. Dengan demikian, akses menempuh pendidikan dasar bagi semua penduduk cenderung sama dan merata.

Indikator 4.1.2 Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun

Gambar 4.2. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur diatas 15 tahun di Kabupaten OKU Selatan tahun 2010-2019



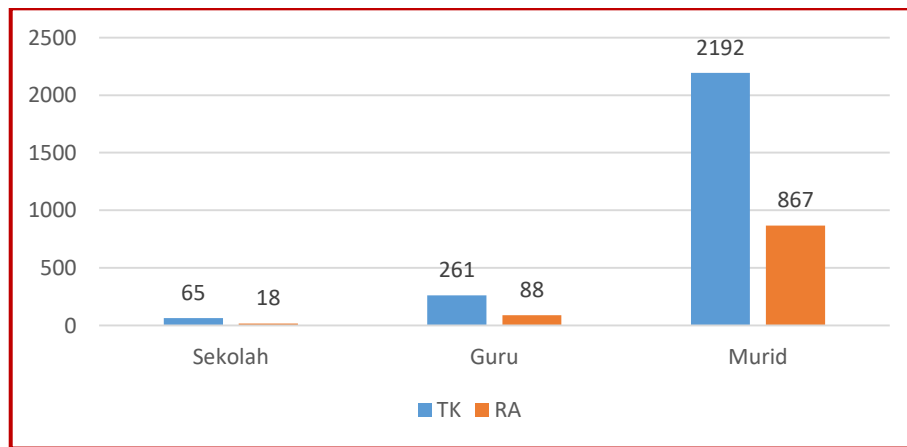
Sumber: Susenas KOR, BPS

Target 4.2 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

Indikator 4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Perkembangan balita dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diperhatikan. Indikator ini merupakan ukuran perkembangan, kompetensi, pengetahuan, dan kesiapan anak untuk masuk ke pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator global yang memiliki proksi dan perlu dikembangkan.

Gambar 4.3. Jumlah sekolah, guru, dan murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten OKU Selatan, 2019/2020



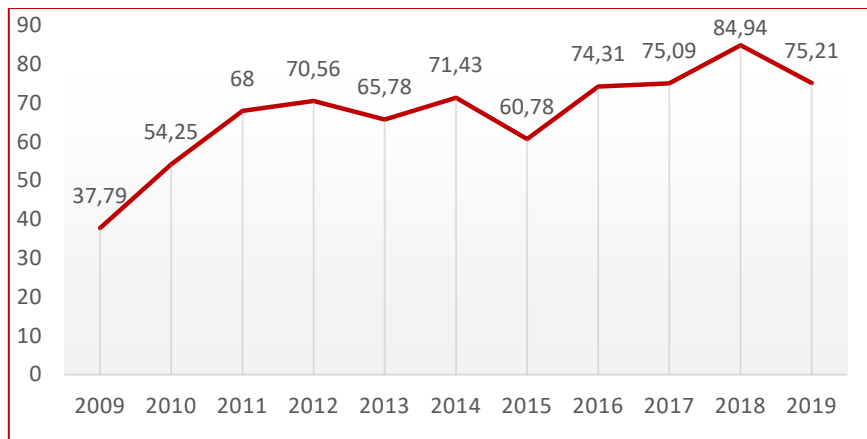
Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020

Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki- laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas

Indikator 4.3.1.(a)Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Indikator ini mengukur kemudahan akses bagi penduduk terutama remaja usia sekolah dalam menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. Selama tahun 2006-2019, APK SMA/sederajat cenderung meningkat, bahkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 37,79 persen pada tahun 2009 menjadi 84,94 persen di tahun 2018. Meski begitu, APK SMA sederajat di Kabupaten OKU Selatan belum menyentuh angka seratus persen.

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten OKU Selatan tahun 2009 – 2019



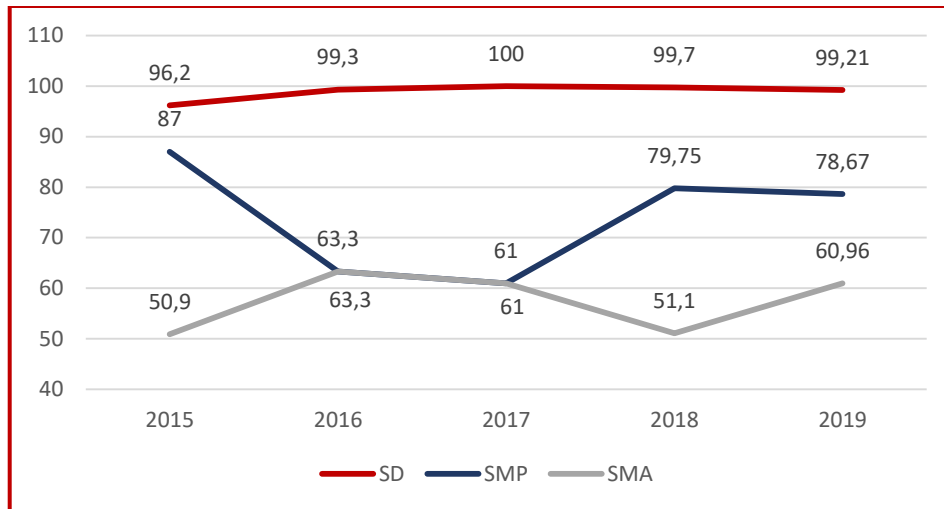
APK SMA sederajat di Kabupaten OKU Selatan mencapai angka tertinggi pada tahun 2018

Sumber: Susenas KOR, BPS

Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan

Indikator 4.5.1(a) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 – 2019



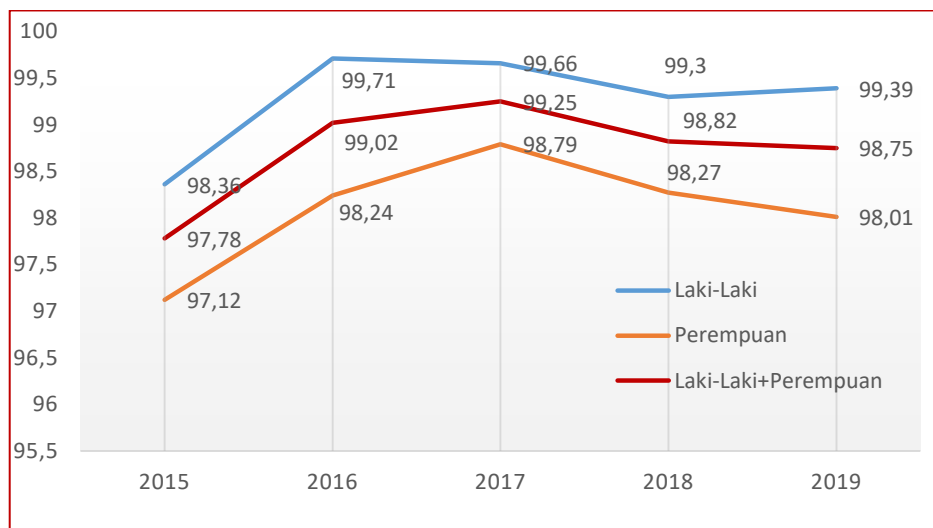
Sumber: Susenas KOR, BPS

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Indikator 4.6.1(a) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk usia >15 tahun

Gambar 4.6. Persentase angka melek aksara penduduk berusia diatas 15 tahun di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019



Sumber: Susenas KOR, BPS

Indikator ini merupakan Indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Angka melek aksara di Kabupaten OKU Selatan sudah cukup tinggi. Pada tahun 2019, kurang dari dua persen penduduk di Kabupaten OKU Selatan yang tidak dapat membaca maupun menuli dengan baik dan benar.

Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan

Indikator 4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa

Indikator ini merupakan indikator yang belum ada metadanya secara global. Untuk Kabupaten OKU Selatan, juga belum ada indikator proksi dan indikator ini adalah indikator global yang harus dikembangkan Kabupaten OKU Selatan.



TUJUAN 5

Kesetaraan Gender

Tujuan 5

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat perempuan, dan yang lainnya. Dengan begitu, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesehatan seksual dan hak bereproduksi. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan ini juga harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.

Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun

Indikator 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan. Hukum nasional yang ditinjau meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri (KemenPPPA). Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara menjumlahkan peraturan/kebijakan responsif gender yang harmonis baik antar peraturan horizontal maupun antar peraturan vertikal. Data Indonesia untuk indikator ini dapat diperoleh dari KPPPA, KemenHukHam, Kemdagri, Komnas Perempuan, dan Bappenas.

Target 5.4 Mengenal dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional

Indikator 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi

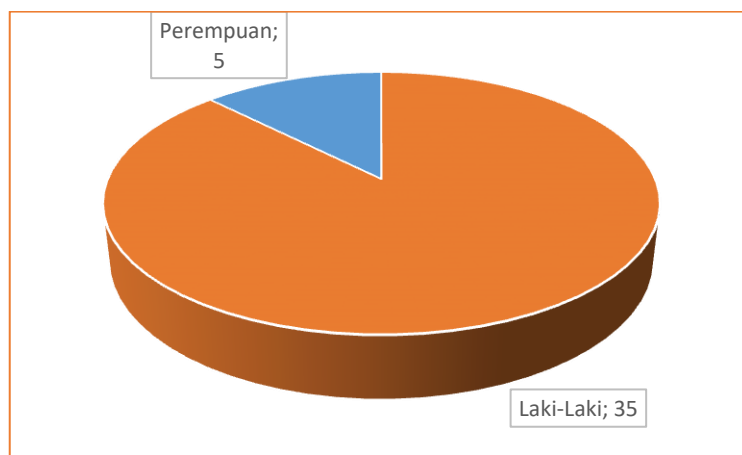
Indikator ini mengukur waktu yang dihabiskan oleh kaum perempuan untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Pekerjaan tidak dibayar tersebut adalah pekerjaan dan perawatan rumah tangga, seperti pekerjaan produksi atau penyediaan jasa untuk konsumsi sendiri dan pekerjaan sukarela untuk kepentingan masyarakat, lingkungan, dan orang-orang selain keluarga. Padahal pekerjaan yang tidak dibayar tersebut erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang kurang dan pekerjaan tersebut identik dengan kaum perempuan. Namun, data untuk indikator ini belum tersedia Kabupaten OKU Selatan, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat

Indikator 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota)

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik harus mulai diperhitungkan, karena dapat menjadi sudut pandang dalam menyejahterakan kaum perempuan. Pada periode 2014-2019 ada empat orang perempuan yang duduk di antara empat puluh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Selatan.

Gambar 5.1 Komposisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Selatan menurut Jenis Kelamin tahun 2019



Sumber: Badan Pusat statistik Kab. OKU Selatan

Indikator 5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

Pada tahun 2016, pada level nasional, sekitar 24 persen jabatan manajer diduduki oleh perempuan. Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Terdapatnya perempuan yang menduduki posisi manajer menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi. Namun, angka tersebut harus terus ditingkatkan untuk mencapai target terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.



TUJUAN 6

Air Bersih dan Sanitasi

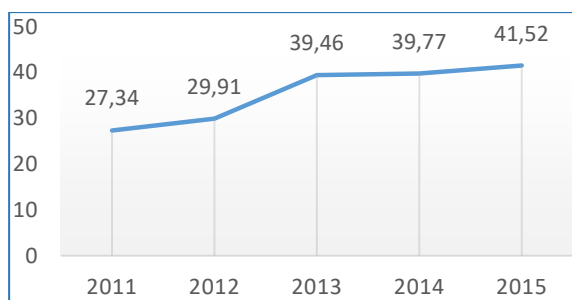
Tujuan 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

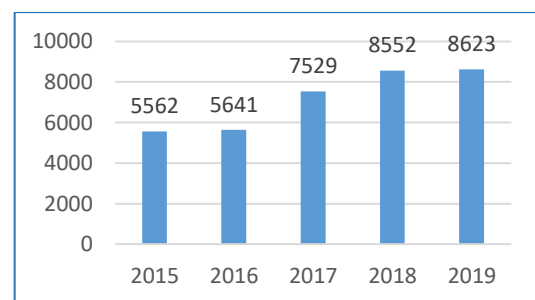
Indikator 6.1.1 Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Gambar 6.1. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih di kabupaten OKU Selatan tahun 2011 – 2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Gambar 6.2 Jumlah pelanggan air di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 – 2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal sepuluh meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan perdesaan yang mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman, seperti yang didefinisikan oleh

Joint Monitoring Programme (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF. Indikator ini menjelaskan keadaan air minum yang lebih rinci dibandingkan indikator “air minum dasar” yang telah dirancang sebelumnya dengan menggabungkan penilaian terhadap kualitas dan keamanan air yang digunakan masyarakat. Dalam laporan ini data indikator dengan seri waktu terbaru belum bisa disajikan karena masalah ketersediaan data. Untuk melengkapi data, digunakan indikator jumlah pelanggan air PDAM yang terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Indikator 6.2.1.(a) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya penduduk dan rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah penduduk dan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting. Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling

efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Membuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.

Setiap rumah tangga tersebut disarankan untuk memiliki tempat khusus untuk mencuci tangan serta tersedianya air dan bahan pembersih untuk mencuci tangan. Pentingnya fasilitas mencuci tangan dikarenakan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun merupakan salah satu perilaku hidup dan sehat yang harus dipraktikkan dalam rumah tangga.

Indikator 6.2.1.(b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

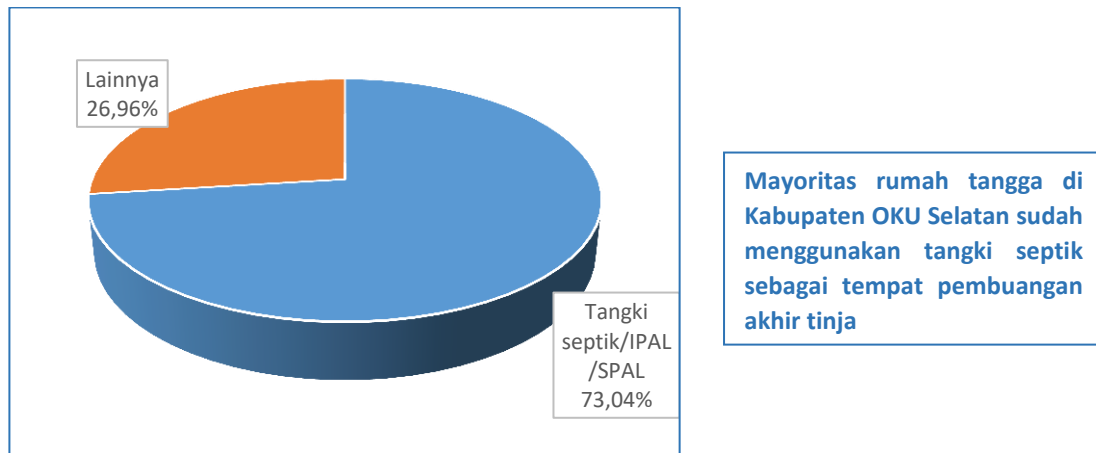
Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan adalah perbandingan rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk mengukur penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2019



Sumber: Susenas KOR 2018, BPS

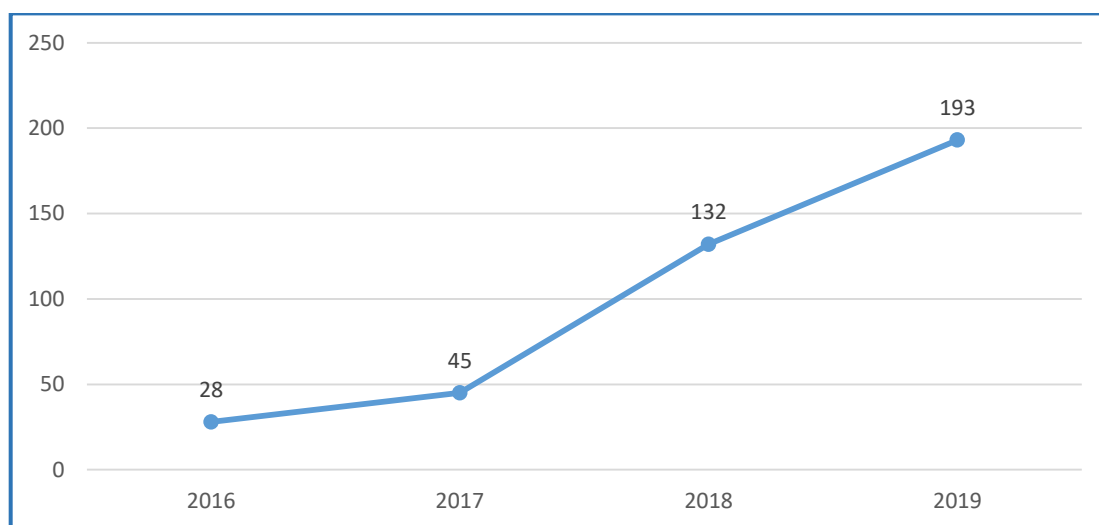
Indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan

mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. Indikator ini digunakan untuk memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 6.4 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten OKU Selatan 2016 – 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan

Indikator 6.2.1.(d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga. Sistem air limbah skala permukiman adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani sekelompok rumah tangga, memiliki jaringan pipa tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem air limbah skala kawasan adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani kompleks perumahan dan kompleks perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder, dan unit pengolahan air limbah. Sistem air limbah skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/ kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal. Indikator ini digunakan untuk memantau pengelolaan air limbah skala kota sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air danau

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli.

Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

Indikator 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air).

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi

oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Target 6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air

Indikator 6.4.1.(a) Pengendalian penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan, percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan adalah upaya menjamin ketahanan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yang diikuti percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

Indikator 6.4.1(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian.

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan eus dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip reduce, mengembangkan eus dan recycle; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture). Indikator ini digunakan untuk mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.



TUJUAN 7

Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

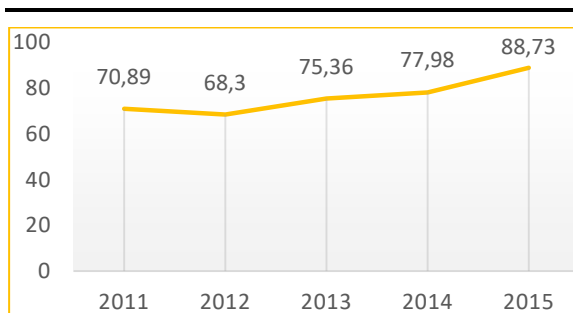
Target 7.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern

Perencanaan energi perlu dilakukan supaya dapat menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, penambahan sarana transportasi seperti kereta api dan angkutan masal Mass Rapid Transit/MRT (BPPT, 2014).

Indikator 7.1.1 Rasio elektrifikasi

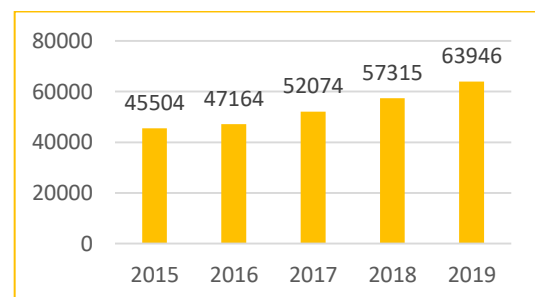
Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai banyak Pembangunan Berkelanjutan dari pengentasan kemiskinan melalui kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, pasokan air dan industrialisasi untuk mitigasi perubahan iklim.

Gambar 7.1. Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik di kabupaten OKU Selatan tahun 2011-2015



Sumber: Susenas KOR, BPS

Gambar 7.2 Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten OKU Selatan 2015 – 2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020

Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global

Indikator 7.2.1 Bauran energi terbarukan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membahas tentang energi terbarukan antara lain; Energi final: energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). Energi terbarukan: energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan air terjun, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%); persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

Di Indonesia, indikator ini diukur dengan indikator proporsi supply energi terbarukan terhadap total supply energi primer yang disediakan oleh Kementerian ESDM. Energi terbarukan yang diukur yaitu hydropower (tenaga air), geothermal (panas bumi), dan biomassa. Hydropower (tenaga air) adalah energi potensial dari air yang mengalir. Energi ini dihitung sebagai input daya untuk menghasilkan listrik dan terdiri dari bendungan, aliran sungai, mini hydro dan micro hydro. Jumlah energi hidro yang dibutuhkan setara dengan energi fosil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Geothermal (panas bumi) adalah salah satu jenis energi yang dihasilkan dari magma di dalam bumi dalam daerah vulkanik. Tekanan panas dan uap tinggi yang dipancarkan dapat dimanfaatkan untuk menekan turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau dimanfaatkan secara langsung untuk pengeringan produk pertanian. Biomassa adalah jenis bahan bakar berbasis bahan organik terbarukan.

Selama periode 2009-2013 di Indonesia proporsi supply biomassa menurun. Hal serupa juga terjadi pada proporsi supply geothermal. Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biomassa jumlahnya cukup memadai namun tersebar. Secara umum, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil. Hal ini disebabkan antara lain tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk akhir

energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umumnya kecil dan tersebar (BPPT, 2014). Kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan proporsi energi terbarukan harus dioptimalkan. Jika tidak, target 7.2 akan semakin sulit dicapai.

Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat

Indikator 7.3.1 Intensitas energi primer

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Definisi terkait dengan energi primer dan intensitas energi primer adalah sebagai berikut:

Energi primer: energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).

Intensitas energi primer (setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah); jumlah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto.



TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8

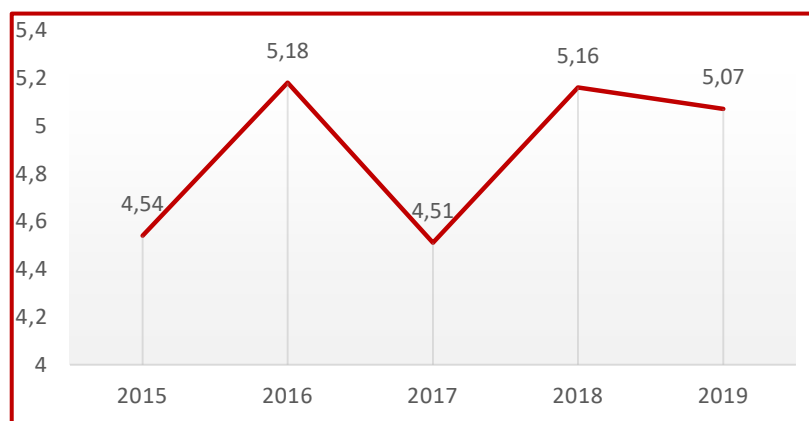
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin.

Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang

Indikator 8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB

Gambar 8.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019

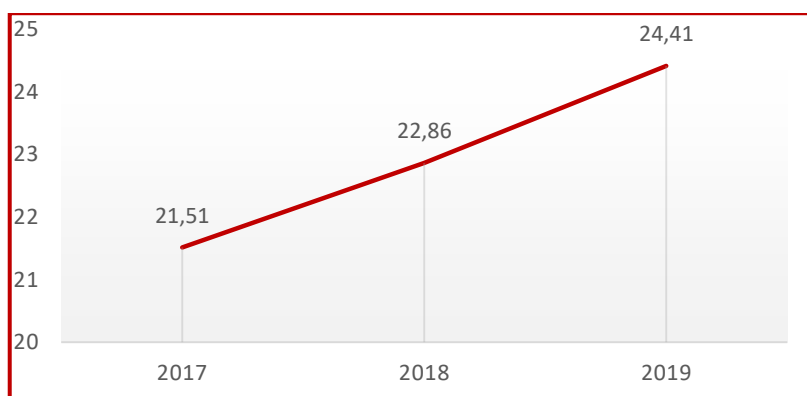


Sumber: BPS

Pada periode 2015-2019, laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten OKU Selatan menunjukkan adanya fluktuasi nilai, namun stabil di sekitar angka lima persen. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB mencapai 5,51 persen, namun cenderung menurun hingga tahun 2017 menyentuh angka 4,51 persen yang merupakan angka terendah selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kembali berada di atas angka lima persen, namun angka ini masih jauh dari target minimal 7 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kerja keras untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Indikator 8.1.1.(a) PDRB per kapita

Gambar 8.2 PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten OKU Selatan tahun 2017 – 2019 (Juta rupiah)



Sumber: BPS

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif, nilai PDRB per kapita di Kabupaten OKU Selatan selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten OKU Selatan mencapai angka 24,41 juta rupiah per tahun.

Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah

Indikator 8.4.1 Jejak material (MATERIAL FOOTPRINT) yang dihitung selama tahun berjalan

Indikator ini dihitung untuk mengetahui jejak material selama tahun berjalan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Indikator 8.4.2 Konsumsi material domestik (DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION)

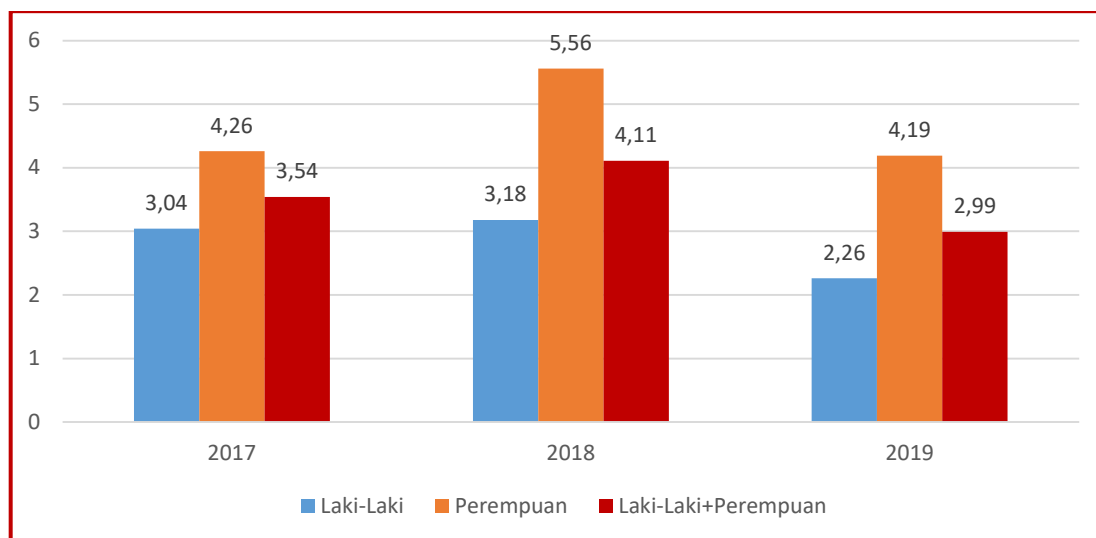
Indikator ini dihitung untuk mengetahui konsumsi material domestik pada waktu tertentu. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

Indikator 8.5.1 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS, konsep pengangguran yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 8.3 Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin tahun 2017-2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka, BPS

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu 2017-2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten OKU Selatan juga mengalami fluktuasi. Secara umum, TPT perempuan selalu lebih tinggi daripada TPT laki-laki hal ini cukup wajar mengingat adanya tuntutan untuk memenuhi kewajiban mengurus rumah tangga bagi perempuan, dan sedikitnya pilihan lapangan pekerjaan bagi perempuan juga menyumbang hal ini.

Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan

Indikator 8.6.1 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

NEET memberikan ukuran pemuda yang berada di luar sistem pendidikan, tidak dalam pelatihan dan tidak dalam pekerjaan, dan dengan demikian berfungsi sebagai ukuran lebih luas dari pendatang muda pasar tenaga kerja potensial dari pengangguran kaum muda. Tingkat NEET tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran kaum muda bisa berarti bahwa sejumlah besar pemuda pekerja berkecil, atau tidak memiliki akses ke

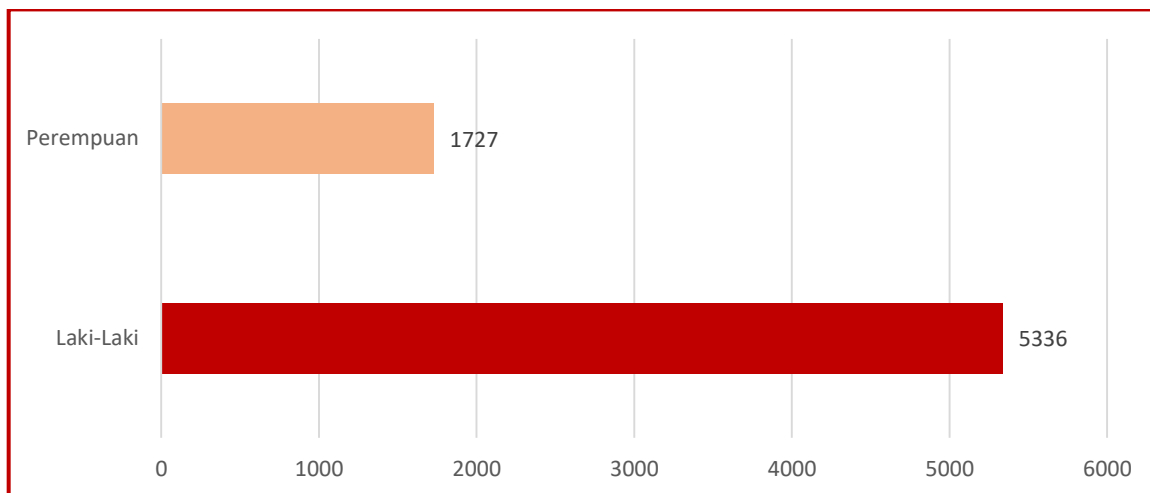
pendidikan atau pelatihan. Tingkat NEET tinggi di antara perempuan dibandingkan dengan laki-laki sering indikasi ketidakseimbangan gender, dengan perempuan muda yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan dan merawat saudara.

Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya

Indikator 8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

Pekerja anak mencerminkan keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan yang seharusnya dilarang dan lebih umum, terlibat dalam jenis pekerjaan yang seharusnya dihilangkan secara sosial dan moral yang tidak diinginkan. Kerangka pengukuran statistik untuk pekerja anak ini disusun berdasarkan (i) usia anak; (ii) kegiatan produktif oleh anak, termasuk sifat dan kondisi di mana ini dilakukan, dan durasi keterlibatan anak dalam kegiatan tersebut. Untuk tujuan pengukuran statistik, pekerja anak mencakup semua orang yang berusia 5 sampai 17 tahun yang selama periode waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kategori berikut kegiatan: (a) bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, (b) bekerja di bawah usia minimum, dan (c) layanan rumah tangga yang belum dibayar dan berbahaya, yang berlaku di mana batas produksi umum digunakan sebagai kerangka pengukuran.

Gambar 8.4 Penduduk berumur 15-19 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin tahun 2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka, BPS

Di Kabupaten OKU Selatan, belum tersedia data yang menggambarkan keadaan pekerja anak. Namun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan BPS, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja pada usia 15 – 19 tahun ada sebanyak 7.063 jiwa atau sekitar 3,63 persen dari total penduduk berusia diatas 15 tahun yang bekerja. Dari 7.063 penduduk, 5.336 penduduk diantaranya berjenis kelamin laki-laki.

Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya

Indikator 8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran

Kecelakaan kerja mengacu pada setiap cedera, penyakit atau kematian akibat kecelakaan kerja, yang merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak terencana, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan satu atau lebih pekerja menimbulkan cedera pribadi, penyakit atau kematian. Kecelakaan kerja yang fatal adalah hasil dari kecelakaan kerja di mana

kematian terjadi dalam waktu satu tahun dari hari kecelakaan, sedangkan non-fatal kecelakaan kerja memerlukan hilangnya waktu kerja. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal dihitung sebagai jumlah kasus baru kecelakaan kerja fatal dan non-fatal selama tahun referensi masing-masing, dibagi dengan jumlah total jam kerja oleh pekerja di kelompok referensi selama tahun referensi, dikalikan dengan 1.000.000,-

Waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja mengacu pada jumlah total hari kalender selama orang-orang sementara lumpuh karena kecelakaan kerja tidak mampu bekerja, tidak termasuk hari kecelakaan itu, hingga maksimal satu tahun. Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan komponen penting dari pekerjaan yang layak. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal dan waktu yang hilang karena kecelakaan kerja memberikan indikasi sejauh mana pekerja terlindungi dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan dan risiko, dan menyajikan informasi yang sangat penting untuk merencanakan langkah-langkah preventive. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Indikator 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Indikator ini digunakan sebagai bentuk tindakan untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya.

Indikator 8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait

Indikator ini digunakan untuk mengetahui kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan ketentuan dari ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

Indikator 8.9.1 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

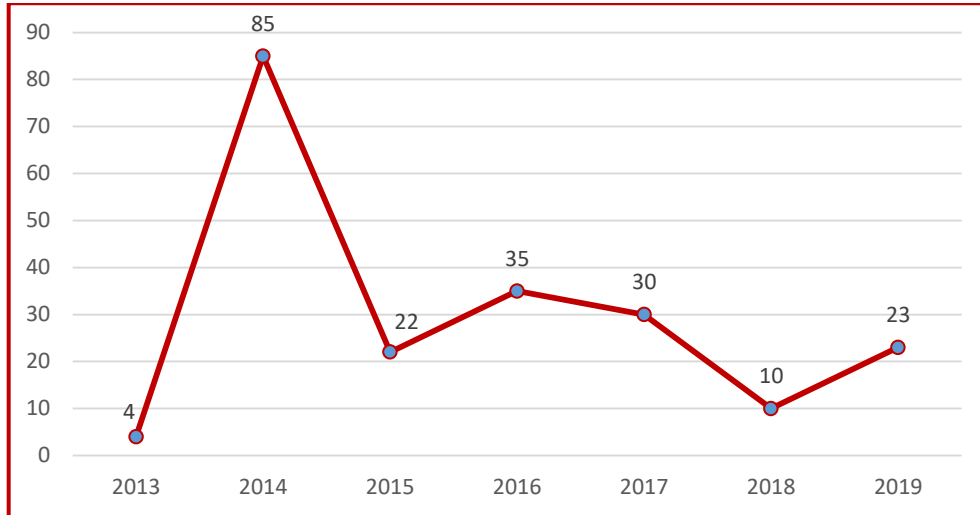
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kedatangan dan perjalanan wisatawan Kabupaten OKU Selatan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.

Di Kabupaten OKU Selatan, nilai PDRB sektor pariwisata yang didekati melalui lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum selalu meningkat dalam rentang tahun 2015 – 2019. Meski terus meningkat, pada tahun 2019, PDRB sektor pariwisata hanya mencapai nilai 96,81 miliar rupiah atau sekitar 1,1 persen dari PDRB ADHB 2019.

Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang disadur dari publikasi OKU Selatan dalam Angka 2020, pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten OKU Selatan ada sebanyak 23 pengunjung.

Gambar 8.5 Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2013-2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020



TUJUAN 9

Industri, Inovasi dan
Infrastruktur

Tujuan 9

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

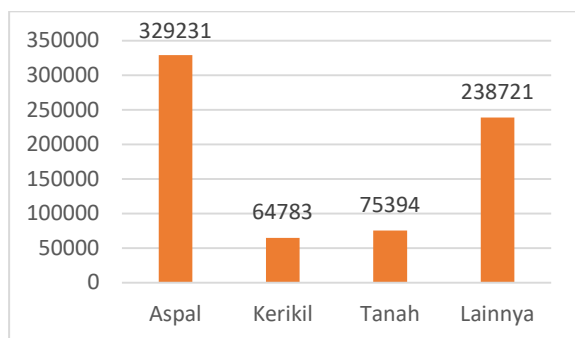
Indikator 9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak

Indikator ini dihitung untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal berada di dalam jarak paling jauh 2 km dari jalan yang kondisinya layak. Ini untuk mengetahui akses penduduk terhadap jalan yang layak. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional

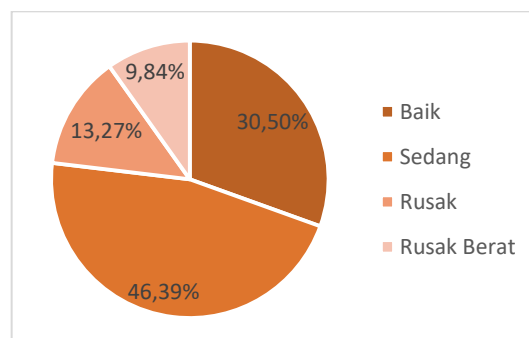
Sampai tahun 2019, tidak ada jalan dengan tingkat kewenangan negara/nasional maupun provinsi di Kabupaten OKU Selatan. Panjang jalan di Kabupaten OKU Selatan mencapai 708.129 km dan seluruhnya merupakan jalan dengan tingkat kewenangan Kabupaten. Dari total panjang jalan tersebut, 30,50 persen berstatus baik.

Gambar 9.1. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten OKU Selatan, 2019



Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020

Gambar 9.2 Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten OKU Selatan, 2019



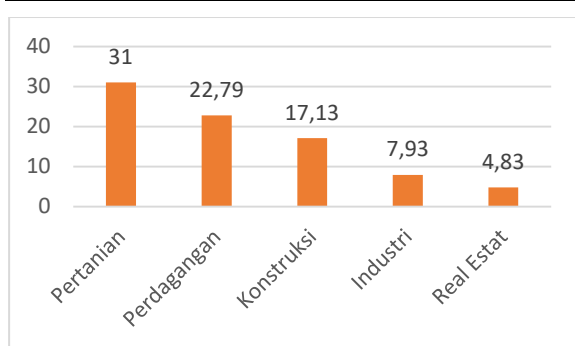
Sumber: OKU Selatan dalam Angka 2020

Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Indikator 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita

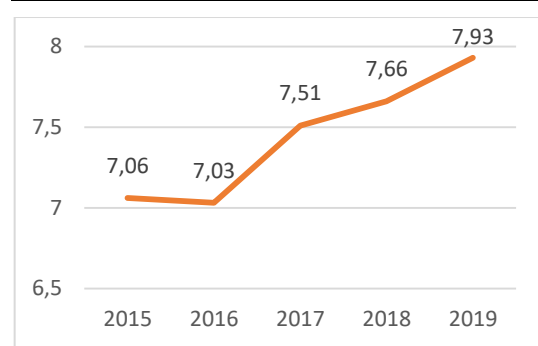
Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai salah satu sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten OKU Selatan. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu dari lima sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten OKU Selatan. Meski begitu, proporsi nilai tambah sektor industry pengolahan pada tahun 2019 hanya sebesar 7,93 persen, masih sangat jauh jika dibandingkan sektor pertanian yang mencapai 31 persen.

Gambar 9.3. Distribusi persentase PDRB menurut lima lapangan usaha tertinggi di Kabupaten OKU Selatan, 2019



Sumber: PDRB Kabupaten OKU Selatan menurut Lap. Usaha 2015 – 2019

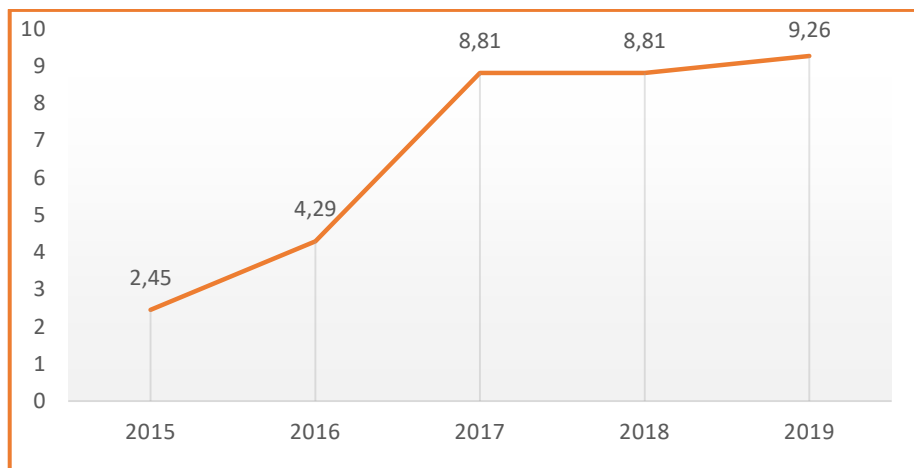
Gambar 9.4. Persentase nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten OKU Selatan, 2015-2019



Sumber: PDRB Kabupaten OKU Selatan menurut Lap. Usaha 2015 – 2019

Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur

Gambar 9.5. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten OKU Selatan menurut Lap. Usaha 2015 – 2019

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa laju pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur mengalami peningkatan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur di Kabupaten OKU Selatan menyentuh angka 9,26 persen yang merupakan angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Target 9.5 **Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.**

Indikator 9.5.1 **Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB**

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk riset pemerintah dengan PDB dikalikan dengan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional.



TUJUAN 10

Berkurangnya
Kesenjangan

Tujuan 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

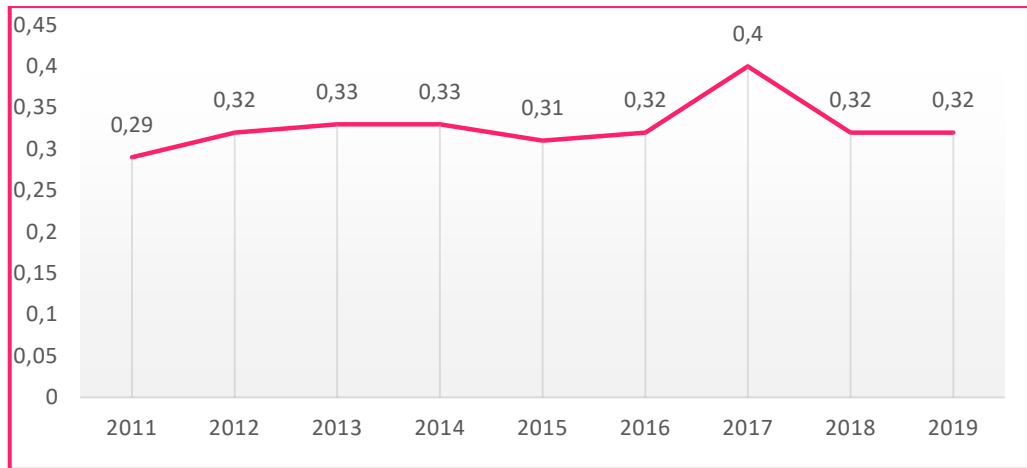
Tujuan 10 yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan-baik di dalam dan antar negara. Para pemimpin dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur. Tujuan 10 ini juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global dan bantuan pembangunan.

Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

Indikator 10.1.1 Koefisien Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Tingkat kesenjangan yang ditunjukkan oleh koefisien Gini di Kabupaten OKU Selatan cenderung stabil pada rentang tahun 2011 – 2019 dengan nilai di sekitar 0,3. Namun pada tahun 2017 angka koefisien gini menyentuh angka 0,4 yang menunjukkan adanya kesenjangan tumbuh secara signifikan pada tahun 2017.

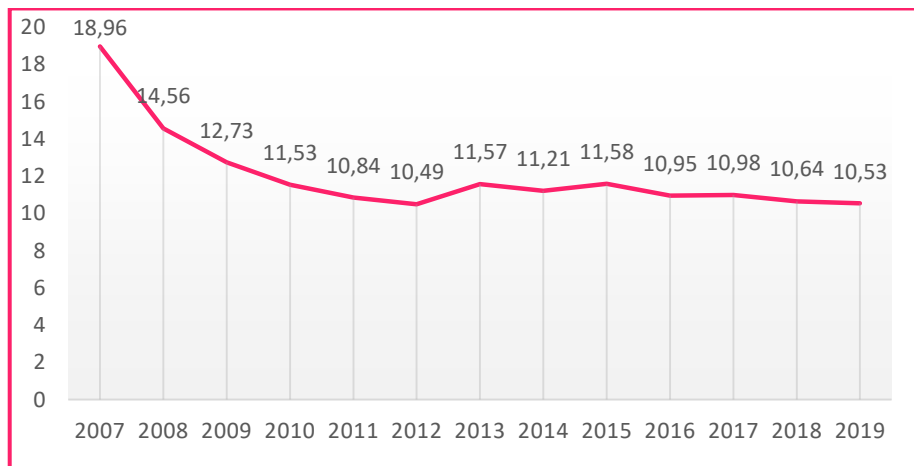
Gambar 10.1 Koefisien gini Kabupaten OKU Selatan tahun 2011-2019



Sumber: BPS

Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Gambar 10.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten OKU Selatan tahun 2007-2019



Sumber: BPS

Program penurunan kemiskinan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan tanda- tanda keberhasilannya. Terlihat dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup berarti.

Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

Indikator 10.2.1 Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas

Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Indikator 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia

Indikator 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

Indikator ini untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi perempuan.

Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Indikator 10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Target 10.5 **Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.**

Indikator 10.5.1 FINANCIAL SOUNDNESS INDICATOR

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Target 10.6 **Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.**

Indikator 10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional

Indikator ini dihitung sebagai jumlah hak suara yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang, dibagi dengan jumlah total hak suara di organisasi internasional, dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Target 10.7 **Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.**

Indikator 10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara

Tujuan Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan. Indikator ini akan dikembangkan pada RAN TPB/SDGs.

Indikator 10.7.1 memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik.

Pekerja migran sering membayar agen perekrutan sebesar upah beberapa bulan. Ini bertentangan dengan komitmen Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta ILO untuk menghapuskan biaya tersebut. Biaya ini tidak proporsional mempengaruhi pekerja berpenghasilan rendah, berketerampilan rendah dari negara-negara berpenghasilan rendah. Dengan mengurangi perekrutan biaya pendapatan disposable pekerja berpenghasilan rendah meningkat dan kesenjangan berkurang dengan memungkinkan orang yang dinyatakan tidak mampu untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk melakukannya tanpa berakhir di jeratan hutang.



TUJUAN 11

Kota dan Pemukiman
yang Berkelanjutan

Tujuan 11

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan *driver* dari pembangunan berkelanjutan.

Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Indikator 11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak

Kesenjangan tata ruang/spasial umumnya dinyatakan sebagai pemisahan kelompok populasi tertentu, yang menyerupai kemiskinan serta kondisi hidup yang tidak memadai. Selain itu, urbanisasi yang cepat, jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan permukiman yang kumuh, liar dan tidak layak serta kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mempertajam kebijakan itu perlu untuk mengidentifikasi dan menghitung daerah kumuh di perkotaan. Sebuah kota yang makmur dan inklusif mampu mengurangi kesenjangan spasial.

Indikator ini merupakan indikator global yang digunakan sebagai bagian dari MDGs dan di *City Prosperity Initiative (CPI)*. Indikator global ini masih perlu untuk dikembangkan. Untuk memenuhinya didekati dengan indikator nasional sebagai proksi yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Indikator 11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan, dan kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, dan sumber penerangan). Dari ketujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.

Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Indikator 11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)

Persentase anggaran yang disediakan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam. Indikator ini merupakan bagian dari anggaran yang didedikasikan untuk pengamanan tersebut, perlindungan warisan alam budaya nasional termasuk situs warisan dunia. Melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia membutuhkan investasi publik di tingkat yang berbeda dari pemerintah termasuk di tingkat nasional dan daerah. Indikator ini akan memungkinkan wawasan apakah negara mempertahankan, memperluas atau mengurangi upaya mereka untuk menjaga warisan alam budaya mereka. Indikator ini merupakan indikator global yang perlu dikembangkan. Indikator nasional yang digunakan sebagai proksi adalah jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan

metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Namun, indikator ini juga belum ditemukan sehingga data belum dapat disajikan.

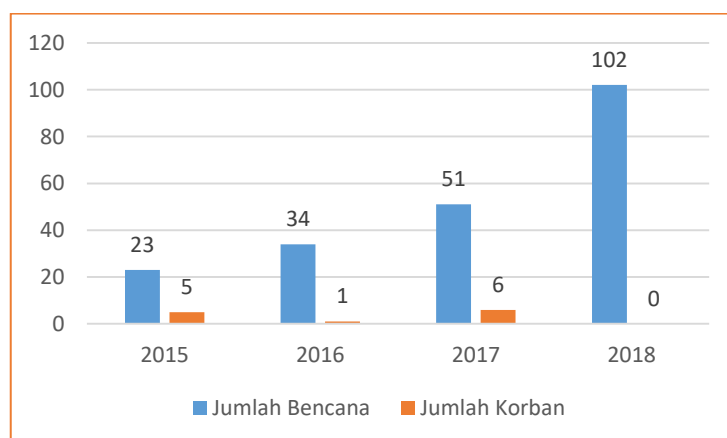
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

Indikator 11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana. Selain korban meninggal dan hilang, ada yang sebagai korban terdampak yaitu korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.

Selama beberapa tahun terakhir jumlah korban bencana alam mengalami fluktuasi mengingat banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi setiap tahunnya berbeda-beda.

Gambar 11.1. Jumlah bencana alam dan korban bencana alam di Kabupaten OKU Selatan tahun 2015 - 2018



Sumber: Potensi Desa 2018, BPS

Indikator 11.5.1.(b) Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk

Pada tahun 2019, hanya ada dua desa tangguh bencana di Kabupaten OKU Selatan, dua desa tersebut adalah Desa Cukoh Nau dan Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are.

Indikator 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan

Hingga tahun 2019, belum terdapat sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di Kabupaten OKU Selatan.



TUJUAN 12

Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung
Jawab

Tujuan 12

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target 12.1 Melaksanakan *THE 10-YEAR FRAMEWORK OF PROGRAMMES ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION PATTERNS*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang

Indikator 12.1.1 Jumlah kolaborasi tematik *QUICKWINS PROGRAM*

Kolaborasi tematik *quickwins program* adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum *waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Saat ini telah dikembangkan kolaborasi tematik yang terdiri atas :

- a. ekolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*)
- b. industri hijau (*green industry*),
- c. bangunan ramah lingkungan (*green building*),
- d. pariwisata ramah lingkungan (*green tourism*), dan
- e. pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*).

Manfaat dari dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum *waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten OKU Selatan.

Target 12.2 Pada Tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

Indikator 12.2.2 Konsumsi material domestik (*DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION*)

Konsumsi material domestik menyajikan jumlah bahan domestik yang digunakan dalam perekonomian dan jumlah material yang perlu ditangani dalam ekonomi. Konsumsi material domestik menggambarkan dimensi fisik dari proses ekonomi dan interaksi. Sedangkan konsumsi material domestik per kapita menggambarkan tingkat rata-rata penggunaan bahan dalam indikator ekonomi tekanan lingkungan. Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten OKU Selatan.

Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen

Indikator 12.3.1 Indeks kehilangan makanan global

Indikator indeks kehilangan makanan global ini mengukur total kerugian yang terjadi dari waktu di mana produksi produk pertanian dicatat hingga mencapai konsumen akhir sebagai makanan. Kerugian yang terjadi dihitung secara kuantitas, kemudian diubah menjadi pasokan energi makanan (dalam kkal) per kapita yang memungkinkan agregasi konsisten dan kemudian diindeks. Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten OKU Selatan.

Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan

Indikator 12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru (12.4.1.(a))**. Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten OKU Selatan.

Indikator 12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan**

Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

Indikator 12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan tingkat daur ulang nasional, ton bahan daur ulang, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **jumlah timbulan sampah yang didaur ulang**

Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari *unit recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Indikator ini akan digunakan untuk memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.



TUJUAN 13

Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara

Indikator 13.1.1 Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API).

Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Di Kabupaten OKU Selatan, setidaknya ada dua dokumen terkait, yaitu: (1) Rencana Kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan, dan (2) Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan.

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

Indikator 13.2.1 Dokumen *BIENNIAL UPDATE REPORT* (BUR)

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) yaitu dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

Indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Sedangkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim

Indikator 13.3.1 Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi

Indikator 13.3.1 ini telah diusulkan dan telah diterima karena sejalan dengan RPJMN 2015- 2019 yaitu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim, pembentukan forum/jejaring/aliasi/pokja adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim. Namun untuk pengumpulan datanya belum tersedia secara reguler.



TUJUAN 14

Ekosistem Lautan

Tujuan 14

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi

Indikator 14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung

Beberapa indikator yang diusulkan yang relevan dengan target 14.1 antara lain :

- a. Klorofil akonsentrasi sebagai indikator biomassa fitoplankton;
- b. Lokasi dan frekuensi ganggang;
- c. Pemilihan prioritas bahan kimia termasuk POPs dan logam berat;
- d. Kuantifikasi dan klasifikasi pantai kumuh.

Indikator yang terkait dengan pengelolaan pencemaran laut dan sampah plastik terapung.

Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif

Indikator 14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola

menggunakan pendekatan berbasis ekosistem, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan (14.2.1.(b))**.

Indikator 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pengelolaan WPP bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya

Indikator 14.4.1 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama merupakan proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman. Penghitungan proporsi tangkapan ini dinyatakan dalam persentase.

Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80 persen dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield* – MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100 persen. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

Indikator 14.5.1 Jumlah kawasan konservasi perairan

Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ha. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur & menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus & berbeda yang tepat & efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *THE WORLD TRADE ORGANIZATION*

Indikator 14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU FISHING)

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*), indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **persentase kepatuhan pelaku usaha (14.6.1.(a))**.

Indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha

Menurut *International Plan of Action to prevent, Deter and Elimination IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, kegiatan yang dianggap sebagai *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pengertian dari pelaku usaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan yang dimaksud dengan persentase

kepatuhan pelaku usaha yaitu banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan *IUU Fishing* dapat dicegah. Metadata untuk indikator ini tidak tersedia.

Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan

Indikator 14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara

Metadata untuk indikator global perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara tidak tersedia, sehingga indikator global ini perlu untuk dikembangkan.

Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar

Indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Selatan, pada tahun 2019 ada delapan pelaku usaha perikanan yang mendapat perlindungan. Pelaku usaha perikanan yang dimaksud mencakup nelayan dan pembudidaya ikan.



TUJUAN 15

Ekosistem Daratan

Tujuan 15

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

Indikator 15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan**.

Indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Penutupan lahan yaitu kondisi permukaan bumi yang menggambarkan penutupan lahan dan vegetasi. Penafsiran untuk penutupan lahan dibagi ke dalam dua klasifikasi utama yaitu Areal Berhutan dan Areal Tidak Berhutan, yang kemudian masing-masing diklasifikasikan lagi secara lebih detail. Areal Berhutan dibagi menjadi Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman.

Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global

Indikator 15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya**.

Indikator 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan). Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman buru (TB).

Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi

Indikator 15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan, indikator ini diprosikan dengan indikator nasional, yaitu **proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan**

Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan

Indikator 15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung

Kontribusi dari situs keanekaragaman hayati pegunungan signifikan terhadap keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung secara global. Konsep kawasan lindung, seperti yang didefinisikan oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), adalah ruang geografis, yang berdedikasi dan dikelola melalui hukum atau cara lain yang efektif, untuk mencapai konservasi jangka panjang dari alam yang terkait dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Berbagai manajemen utamanya tertuju pada konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Indikator ini belum tersedia Kabupaten OKU Selatan, sehingga indikator global ini perlu dikembangkan.

Indikator 15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan

Ada korelasi langsung antara tutupan hijau pegunungan dengan kondisi kesehatan, sehingga perlu dilakukan pemantauan perubahan gunung vegetasi dari waktu ke waktu

untuk mengukur status konservasi ekosistem pegunungan. Secara khusus, indeks tutupan hijau pegunungan dapat memberikan informasi tentang tutupan hutan dan kayu, yang umumnya terkait dengan eksploitasi hutan, pengambilan kayu, koleksi bahan bakar kayu. Indikator ini belum tersedia Kabupaten OKU Selatan, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan menggunakan dataset yang ada *Global Land Cover* (GLC).

Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah

Indikator 15.5.1 Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas

Dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati salah satu sasaran program/indikator kinerja program 70 STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015 adalah usaha peningkatan persentase peningkatan populasi dua puluh lima (25) jenis satwa terancam punah prioritas sebesar 10 persen pada tahun 2019. Berdasarkan SK Dirjen KSDAE No. SK.180/IV-KKH/2015, 25 jenis satwa tersebut adalah harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani.

Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional

Indikator 15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Indikator ini belum tersedia Kabupaten OKU Selatan, sehingga indikator global ini dapat dikembangkan.

Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal

Indikator 15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan poporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi**

Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas

Indikator 15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI), indikator ini

diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati**

Indikator 15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati

Kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati adalah tersedianya regulasi, kebijakan, strategi dan prosedur untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Data indikator ini belum dapat disajikan karena belum ditemukan.

Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan

Indikator 15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020

Indikator ini adalah indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional, yaitu **nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat**

Indikator 15.9.1.(a) Nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui nilai ekonomi kontribusi keanekaragaman hayati dalam berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pembangunan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Data indikator yang bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) ini belum berhasil ditemukan, sehingga belum dapat disajikan.



TUJUAN 16

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16

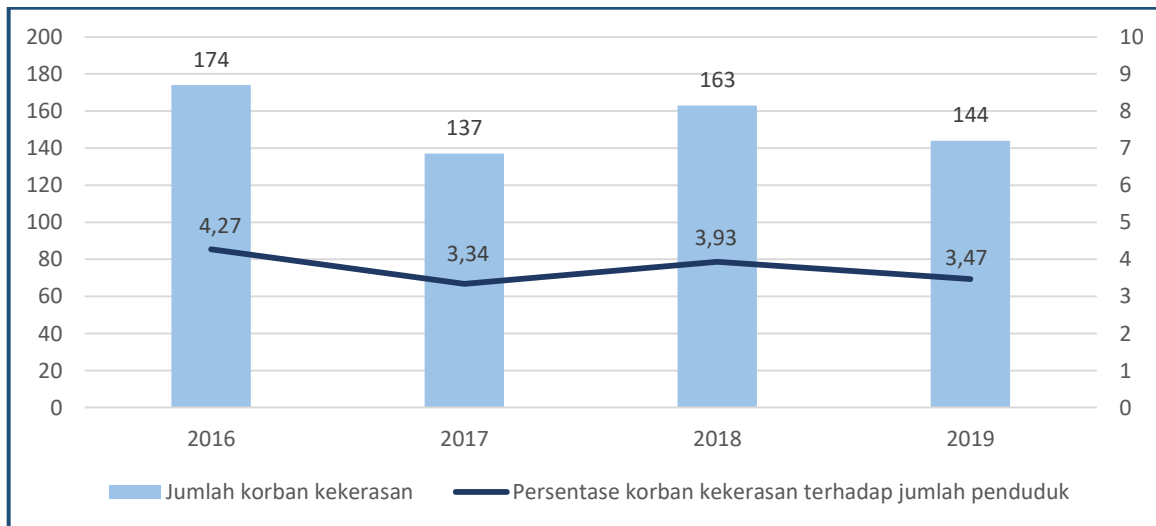
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Jumlah korban tindak kejahatan kekerasan selama satu tahun di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2019 berjumlah 144 korban atau sekitar 3,47 persen dari total penduduk Kabupaten OKU Selatan. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah korban pada tahun 2018 yang berjumlah 163 korban atau sekitar 3,93 persen penduduk.

Gambar 16.1 Jumlah dan persentase korban kekerasan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019



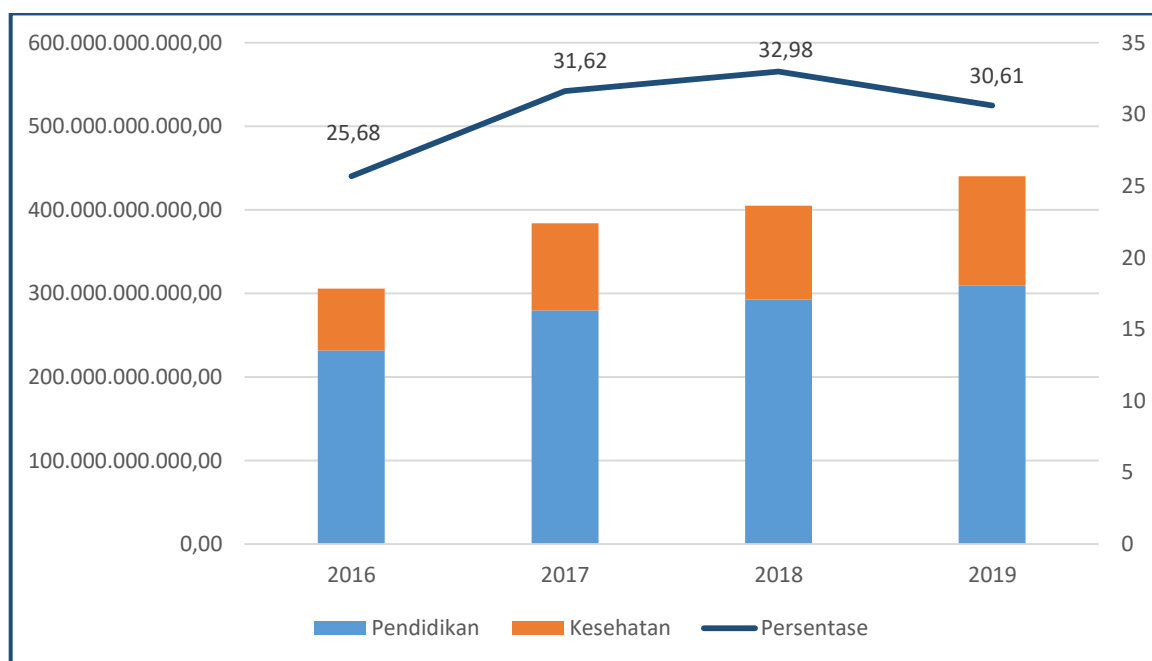
Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten OKU Selatan

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Indikator 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Pengeluaran utama pemerintah Kabupaten OKU Selatan adalah urusan kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2019, kedua urusan ini memiliki total pengeluaran sebesar Rp. 439.963.349.139,22 atau sekitar 30,61 persen anggaran yang disetujui.

Gambar 16.2 Jumlah dan persentase pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui di Kabupaten OKU Selatan, 2016-2019

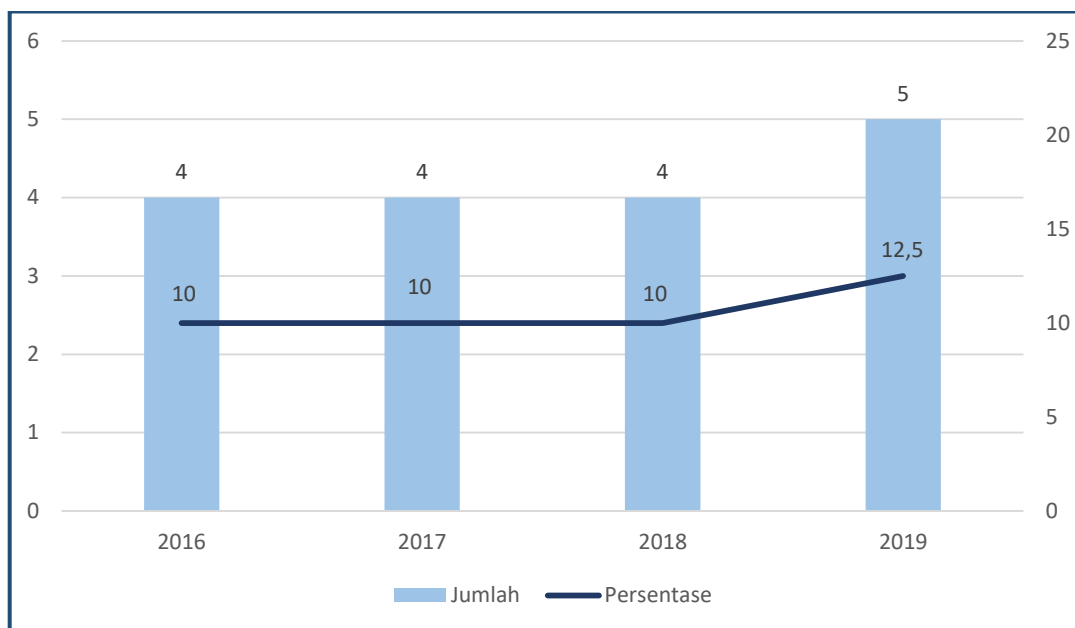


Sumber: BPKAD Kabupaten OKU Selatan

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

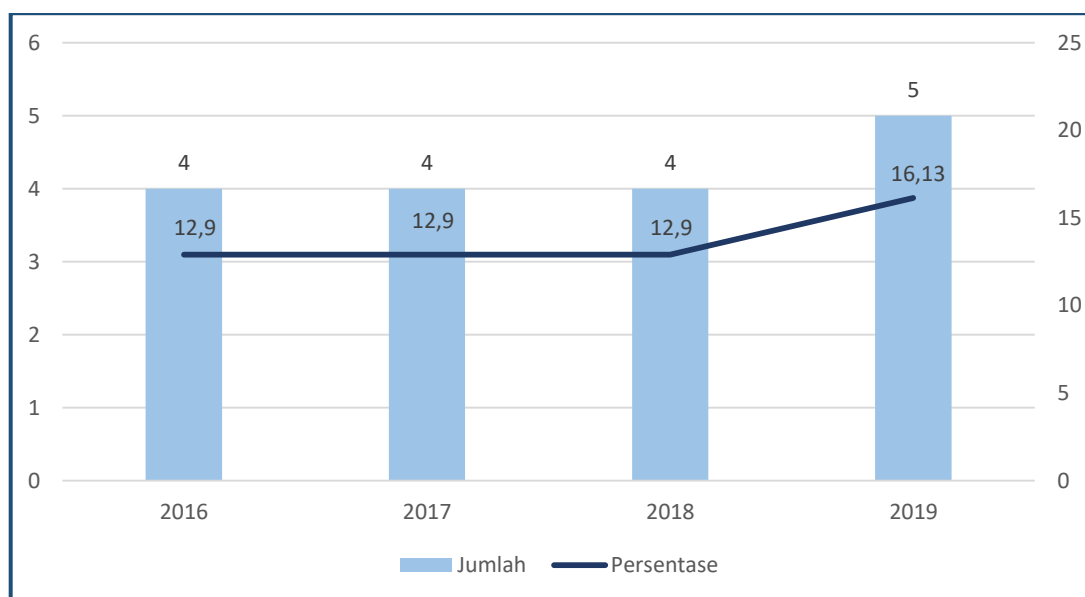
Gambar 16.3 Jumlah dan persentase anggota DPRD berjenis kelamin perempuan di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019



Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten OKU Selatan

Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Gambar 16.4 Jumlah dan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) di Kabupaten OKU Selatan tahun 2016 – 2019



Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten OKU Selatan



TUJUAN 17

Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan

Tujuan 17

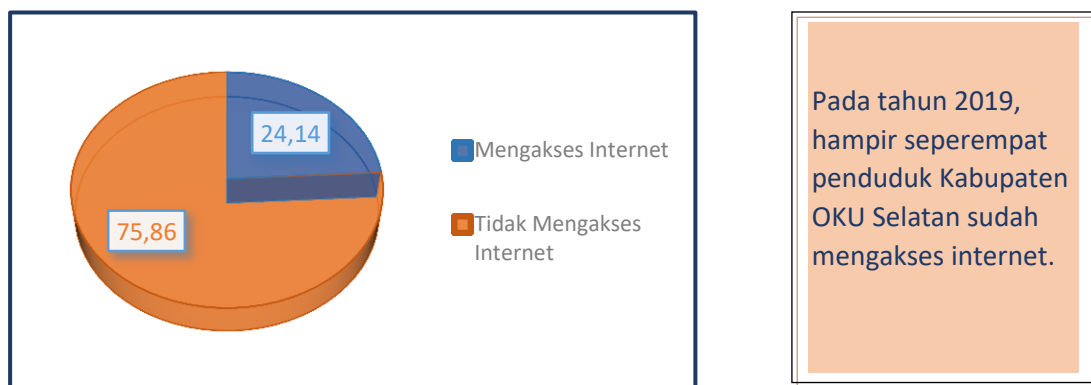
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada tujuan 17, untuk mencapai target yang ambisius dari agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor-aktor lainnya.

Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi

Indikator 17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet

Gambar 17.1. Proporsi penduduk OKU Selatan yang mengakses internet pada tahun 2019



Sumber: Susenas KOR, 2019

Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global

Indikator 17.11.1 Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global

Indikator ini memperhitungkan ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia oleh negara berkembang dan kurang berkembang, dan diukur dalam persentase atau dalam ribu dolar US. Indikator ini sangat mencerminkan tujuan dalam target, yaitu meningkatkan ekspor dari negara berkembang dan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global. Indikator global ini diproksikan dengan indikator nasional, yakni **ekspor produk non migas**

Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan

Indikator 17.13.1 Tersedianya Dashboard makroekonomi

Peningkatan stabilitas makroekonomi global dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain berdasarkan laju inflasi, nilai tukar Rupiah, atau berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai dari keseluruhan produksi barang dan jasa pada suatu negara dengan rentang waktu tertentu. PDRB menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan kondisi prekonomian di suatu wilayah atau dengan kata lain PDRB merupakan alat pengukur dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

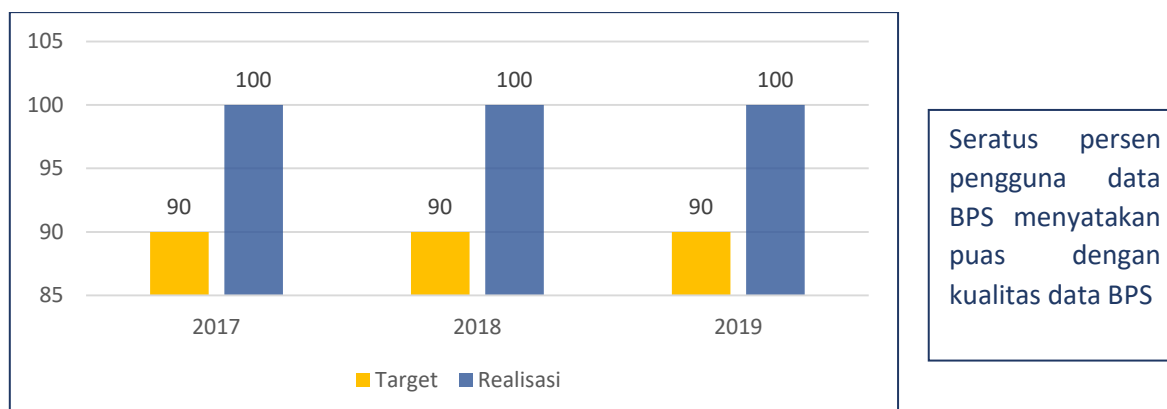
Target 17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya

Indikator 17.18.1 Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi

Kemampuan Kantor Statistik Nasional dan badan-badan lain dalam negara untuk melaporkan keanekaragaman dalam indikator SDGs merupakan ukuran kapasitas dari badan tersebut. Kapasitas tersebut semakin besar apabila lembaga atau badan statistik dapat menimbang kompleksitas atau disagregasi dari indikator tersebut. Indikator global ini diproksi dengan empat indikator nasional, yaitu **(1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; (2) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; (3) Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun; dan (4) Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu.**

Indikator 17.18.1.(a) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Gambar 17.2. Target dan Realisasi Persentase konsumen yang puas dengan kualitas data BPS tahun 2016-2019



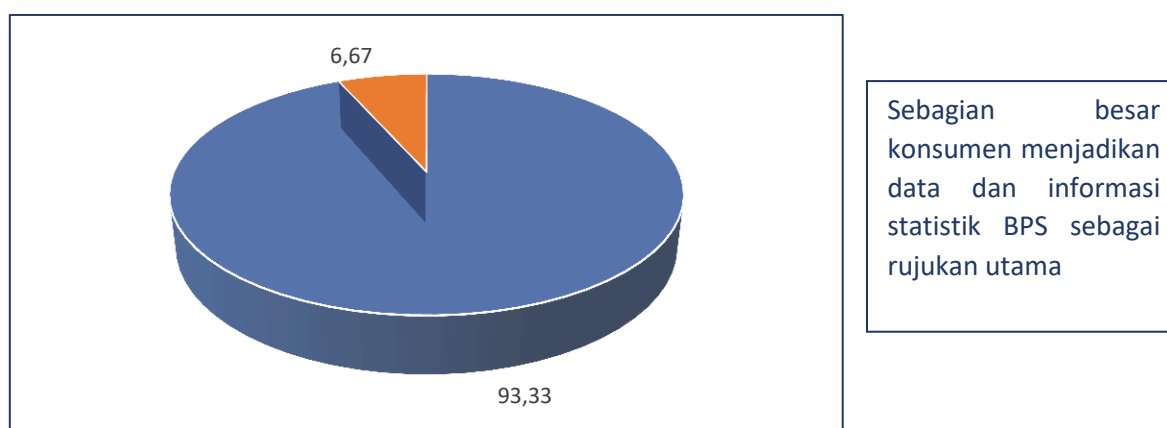
Sumber: Survei Kebutuhan Data, BPS

Kepuasan merupakan refleksi pengguna jasa setelah menggunakan jasa BPS sebagai penyedia data. Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir kepuasan konsumen data terhadap kualitas data BPS OKU Selatan sudah mencapai 100%, artinya tidak ada konsumen yang tidak puas dengan data yang dihasilkan BPS. Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2030 BPS sudah mampu menyediakan data yang berkualitas tinggi sesuai dengan target 17.7 dapat tercapai.

Indikator 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Data dan informasi statistik BPS dimanfaatkan oleh pengguna untuk berbagai hal. Pada tahun 2017, sebesar 91,67 persen pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Semakin banyak pengguna menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama maka dapat dikatakan BPS menyediakan data yang berkualitas, up to date, dan dapat dipercaya.

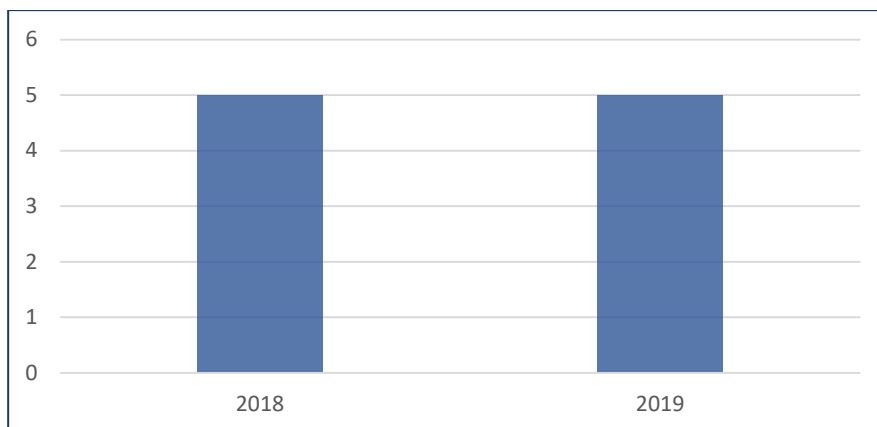
Gambar 17.3. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama tahun 2019



Sumber: Survei Kebutuhan Data, BPS

Indikator 17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

Gambar 17.4. Jumlah metada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun oleh BPS tahun 2018-2019



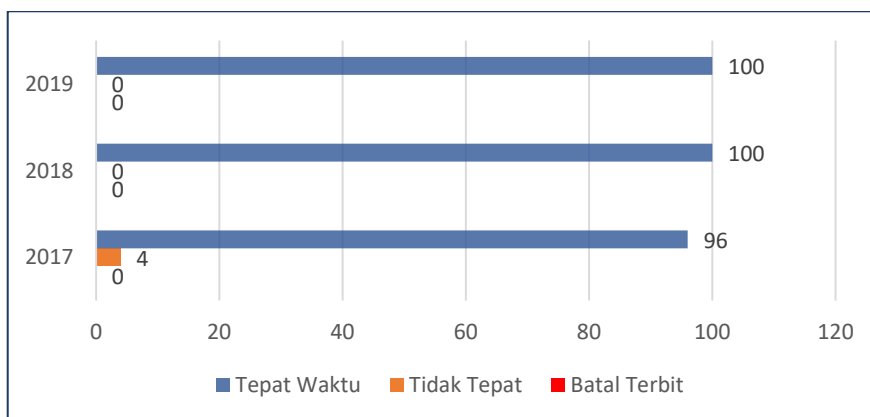
Sumber: Survei Kebutuhan Data, BPS

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus bermanfaat untuk menunjang Sistem Statistik Nasional. Pada tahun 2016 hingga 2017, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun oleh BPS berjumlah sama.

Indikator 17.18.1.(d) Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu

Kemampuan BPS untuk menghasilkan data dan informasi statistik dalam bentuk publikasi/ laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dapat dilihat melalui evaluasi Advanced Release Calendar (ARC) BPS. Hasil dari evaluasi ARC BPS menunjukkan bahwa selama periode 2017 - 2019, menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu bahkan menyentuh angka seratus persen. Jika keadaan ini mampu dipertahankan oleh BPS, maka target 17.18 dapat tercapai.

Gambar 17.5. Persentase publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu, tidak tepat waktu dan batal rilis tahun 2017-2019



Sumber: Survei Kebutuhan Data, BPS

Indikator 17.18.2 Tersedianya undang-undang statistik yang tunduk pada Prinsip-prinsip Fundamental Statistik Resmi.

Indikator ini belum tersedia metadatanya secara global maupun secara lokal di Kabupaten OKU Selatan. Kegiatan statistik pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang tersebut mengatur mengenai asas, arah, dan tujuan statistik, jenis statistik dan cara pengumpulan data, penyelenggaraan statistik, pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik, koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik, hak dan kewajiban penyelenggara, petugas, serta responden kegiatan statistik, kelembagaan, pembinaan, ketentuan pidana, dan yang lainnya.

Indikator 17.18.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan

Indikator ini belum tersedia metadanya secara global. Indikator ini diukur dengan indikator nasional, yaitu **persentase konsumen yang puas terhadap data BPS**.

Indikator 17.18.3.(a) Persentase konsumen yang puas terhadap data BPS

Indikator ini mencoba untuk melihat kemampuan lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang cepat, murah, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan (reliabel). Hal ini guna menilai kualitas data statistik dan sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Penjelasan indikator ini sudah dipaparkan pada indikator 17.18.1(a).

PENCAPAIAN INDIKATOR TPB / SDGs KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019

Pilar 1. Pembangunan Sosial

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10,95%	10,98%	10,64%	10,53%	Dinas Sosial
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	5,37	5,91	6,77	8,31	Dinas Kesehatan
	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	7,66	7,66	7,88	7,89	Disnakertrans
	1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3,72	6,31	44,48	56,82
1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	1.3.1 (d) Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	7.731	7.581	15.110	14.536	Dinas Sosial
	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan	1.4.1.(a). Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan	5,82%	37,04%	40,28%	43,01%	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	10,73%	12,10%	14,84%	17,55%	Dinas Kesehatan

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019		
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	26,98	40,26	40,69	52,52	Dinas PUPR	
	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	39,85	54,84	69,62	68,91	Dinas PUPR	
	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	1.4.1.(g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	99,33%	99,72%	99,70%	99,21%	Disdik	
	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	1.4.1.(h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	85,12%	83,48%	79,75%	78,67%	Disdik	
	1.4.1.(i). Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	1.4.1.(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	1.4.1.(i). Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	63,33%	61,04%	61,07%	61,10%	Disdik	
	1.4.1.(j). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	1.4.1.(j) Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	95,99	97,80	95,82	95,07	Dinas Admnduk Cakil	
	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	24,60	26,27	39,48	49,41	Disperkim	
	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	-	-	1	2	BPBD	
		1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial	
		1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	-	-	-	BPBD

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	1.a.1(*) Proporsi pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (*) modifikasi indikator yang dimaksud adalah proporsi anggaran daerah untuk program kemiskinan	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API), Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	-	-	-	-	
	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	1.a.2(*) Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (*) dimaksud adalah pengeluaran dari APBD.	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan) sebagai persentase dari total belanja pemerintah 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (kesehatan) sebagai persentase dari total belanja pemerintah 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	19,47	23,02	23,84	21,51	Bappeda Litbang
				1	1	1	1	
				-	1	1	0	Bappeda Litbang
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				1	1	1	1	
				0	0	0	0	Bappeda Litbang
				19,47	23,02	23,84	21,51	Bappeda Litbang
				6,21	8,60	9,14	9,10	Bappeda Litbang
			1,20	1,64	1,92	2,09	Bappeda Litbang	

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana		
				2016	2017	2018		2019	
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0,037	0,047	0,027	0,075	Dinas Kesehatan	
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari.	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	2,79	2,77	2,74	2,74	DKP
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2,06	2,12	2,10	8,90	Dinas Kesehatan	
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	2.2.2 Prevalensi Malnutrisi (wasting/ obesitas) pada anak balita	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	11,86	11,88	11,87	10,41	Dinas Kesehatan
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	0,13	0,17	4,35	3,87	Dinas Kesehatan	
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	85,90	96,26	96,25	96,88	Dinas Kesehatan	
	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	72,80%	82,40%	82,50%	82,60%	DKP
	2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	-	-	-	1	DKP

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana			
				2016	2017	2018		2019		
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	3.1.1 Jumlah Kematian Ibu yang terdata (terlaporkan)	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	325	146	102	4	Dinas Kesehatan		
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	3.1.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	71,83%	73,05%	75,92%	77,97%	Dinas Kesehatan		
	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	3.1.2 (a) Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan	5,82%	37,04%	40,28%	43,01%	Dinas Kesehatan		
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	3.2.1 Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	11,12	10,26	9,24	9,14	Dinas Kesehatan	
		3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2 Jumlah Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3,84	2,99	0,77	7,14	Dinas Kesehatan	
		3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	30	23	6	50	Dinas Kesehatan	
		3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	3.2.2 (b) Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi	89,79%	94,20%	0,00%	92,31%	Dinas Kesehatan	
		3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0,0007	0,0005	0,0010	0,0010	Dinas Kesehatan
			3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	26,97	35,34	54,56	32,28	Dinas Kesehatan

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	2,31	2,07	0,63	0,95	Dinas Kesehatan
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	82,80	75,49	74,12	72,81	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi	1,11	10,24	13,64	14,05	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	3.4.2 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	-	-	-	-	BNN Daerah
	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	-	-	-	-	BNN Daerah
	3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	-	-	-	-	BNN Daerah

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
	3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	3.5.1 (d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	-	-	-	-	BNN Daerah
	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	-	-	-	-	BNN Daerah
	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	-	-	-	-	BNN Daerah
3.6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	-	-	-	-	Polres OKU Selatan
	3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	70,61	68,61	70,20	70,10
3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pd Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 thn yg berstatus kawin.		3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pd Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 thn yg berstatus kawin.	3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pd Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 thn yg berstatus kawin.	70,61	68,61	70,20	70,10	Dinas PPKBP3A
3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).		3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	3.7.1 (b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	25,91	26,20	23,37	22,70	Dinas PPKBP3A
	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	1,29	1,26	1,26	1,13	Dinas PPKBP3A
	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	8,73	8,50	8,53	7,61	Dinas PPKBP3A

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	1,55	1,43	1,32	1,26	Dinas Kesehatan
	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2 Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	38,49	38,26	54,45	54,34	Dinas Kesehatan
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	38,49	38,26	54,45	54,34	Dinas Kesehatan
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan	3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	30,99	28,68	33,99	40,31	Dinas Kesehatan
	3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	3.b.1(a). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	2,29	2,67	2,72	2,44	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	15,88	23,74	34,89	30,22	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	32,56	36,78	43,82	44,94	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	4.1.1 (c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	117,57%	112,28%	111,45%	112,19%	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	93,75%	92,17%	86,44%	86,65%	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	74,31%	75,09%	84,94%	75,21%	Dinas Pendidikan
	4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,47	7,66	7,82	7,83	Dinas Pendidikan
	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	25,78	33,41	33,47	36,68	Dinas Pendidikan
	4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/ SMK/sederajat	74,31%	75,09%	84,94%	75,21%	Dinas Pendidikan
		4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	6,31	11,92	20,29	24,13	Dinas Kominfo
	4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		4.6.1.(a). Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	4.6.1.(a). Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	99,33	99,72	99,70	99,21
	4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	85,12	83,48	79,75	78,67
				63,33	61,04	61,07	60,96	
				99,02	99,25	98,82	98,83	Dinas Pendidikan
				70,02	69,75	70,61	84,55	Dinas Pendidikan

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (Matriks bidang pembangunan Hal. II.2.M-163)	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	-	-	-	1	Dinas PPKBP3A
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,0064	0,1692	0,2497	0,0000	Dinas PPKBP3A
	5.2.1.(a). Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	5.2.1.(a). Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PPKBP3A
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0	0	Dinas PPKBP3A
	5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PPKBP3A
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	9,20	10,18	9,41	9,40	Dinas PPKBP3A
	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	1,29	1,26	1,26	1,13	Dinas PPKBP3A

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.3.1.(c). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	5.3.1 (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	0	0,00%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan	
	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	1	2.017,00	2.018,00	2.019,00	Sekretariat DPRD	
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	3	2.016,00	2.017,00	2.018,00	BKPSDM	
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut	5.6.1*Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	5.6.1 (a) Uhmnet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	3	2.016,00	2.017,00	2.018,00	Dinas PPKBP3A	
	5.6.1 (a). Uhmnet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1 (a) Uhmnet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	3	-	-	-	Dinas PPKBP3A	
	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	5.6.1 (a). Uhmnet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	3	29,39	31,39	29,90	Dinas PPKBP3A
5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	5.6.2 Perda yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	50.522	52.761	54.452	54.118	Dinas PPKBP3A
	5.6.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	5.6.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Sumber: Dinas PPKBP3A	-	-	-	-	Dinas Kominfo

Pilar 2. Pembangunan Ekonomi

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1* Rasio elektrifikasi	7.1.1 Rasio elektrifikasi	7.1.1* Rasio elektrifikasi	28,68	41,51	54,63	-	Dinas Perkim
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	113,06	117,63	131,43	152,68	Dinas Perkim
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	-	-	-	Dinas Perkim
7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1* Bauran energi terbarukan	7.2.1 Bauran energi terbarukan	7.2.1* Bauran energi terbarukan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perkim
	7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat	7.3.1* Intensitas energi primer	7.3.1 Intensitas Energi Primer (SBM)	7.3.1* Intensitas energi primer	6,00	6,22	6,42	6,67

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita	8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita	3,83	3,22	3,93	3,91	Bappeda Litbang
	8.1.1.(a). PDB per kapita	8.1.1 (a) PDRB per kapita. (ribu rupiah)	8.1.1.(a). PDB per kapita	20.123,75	21.511,98	22.859,97	24.417,35	Bappeda Litbang
	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	8.3.1 Pekerja informal sektor non-pertanian	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	24,37	32,84	34,87	31,22	Disnakertrans
8.3. Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	8.3.1 (a) Persentase tenaga kerja formal	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	5,69	10,21	10,39	10,70	Disnakertrans
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	52,23	75,28	74,14	76,21	Disnakertrans
	8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	-	-	-	-	Dinas Koperasi, UKM Perindag
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja					Disnakertrans
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	N.A	3,54	4,11	2,99	Disnakertrans
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	8.5.2 (a) Persentase setengah pengangguran	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	0,37	1,89	1,48	2,11	Disnakertrans
8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	8.6.1 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).					Disnakertrans

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	367	421	531	589	Disnakertrans
	8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	35	30	10	
				13.534	30.000	35.010	45.796	Disparbud
								Disparbud

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana		
				2016	2017	2018		2019	
<p>9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</p>	9.1.1.(a). Kondisi mantap jalan nasional	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	9.1.1.(a). Kondisi mantap jalan nasional	37,11	46,70	50,70	76,89	Dinas PUPR	
	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	0	0	0	0	Dinas PUPR	
	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api	0	0	0	0	Dinas PUPR	
	9.1.2.(a) Jumlah bandara	9.1.2.(a) Jumlah bandara	9.1.2.(a) Jumlah bandara	1	1	1	1	Dishub	
	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	1	2	2	2	Dishub	
	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	-	-	-	-	Dishub	
	<p>9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p>	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	7,03	7,51	7,66	7,93	Dinas Koperasi, UKM Perindag
		9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0,25	1,18	4,28	3,31	Disnakertrans
		9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	-	-	-	-	Dinas Kominfo
		9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	9.c.1 (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	80,00	85,45	86,00	74,84	Dinas Kominfo
<p>9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.</p>	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	6,31	11,92	20,29	24,14	Dinas Kominfo	

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENIANGAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1.* Koefisien Gini	10.1.1 Koefisien Gini	10.1.1* Koefisien Gini	0,320	0,395	0,317	0,320	Bappeda Litbang
	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10,95	10,98	10,64	10,53	Dinas Sosial
	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	10.1.1 (b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan					Dinas PMPD
	10.1.1.(c). Jumlah desa tertinggal	10.1.1 (c) Jumlah desa tertinggal	10.1.1.(c). Jumlah desa tertinggal	112	112	180	139	Dinas PMPD
	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	4	4	4	4	Dinas PMPD
	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	10.1.1 (e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-				Dinas PMPD
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal					Dinas PMPD	

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpelihara berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik				BPS	
	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama				BPS
17.19 Pada tahun 2030, mengadalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020				BPS	
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)				BPS	
	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.				BPS	

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).					BPS
	17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.					BPS

Pilar 3. Pembangunan Lingkungan

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	26,98	33,28	39,78	46,04	Dinas PUPR
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan yang memiliki akses layanan minum aman dan berkelanjutan	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	6,17	7,58	9,08	10,60	Dinas PUPR
	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	26,02	36,50	46,56	45,67	Dinas Kesehatan
	6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	6.2.1.(b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	6.2.1.(b) Proporsi populasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	31,31	97,75	98,26	97,28	Dinas PUPR
	6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi 279 (2017) dan 279 (2017) dan 25000a 30000 Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	28	45	132	193	Dinas Kesehatan
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	6.2.1.(d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	6.2.1.(d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	28	45	132	193	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	-	-	-	Dinas Perkim	

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	-	-	-	-	Dinas Perkim
	6.3.2 (a) Kualitas air danau	6.3.2 (a) Kualitas air danau	6.3.2 (a) Kualitas air danau	6.3.2 (a) Kualitas air danau	-	-	-	DLH
	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	-	-	-	DLH
	6.4.1 (a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	6.4.1 (a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	6.4.1 (a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	6.4.1 (a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	-	-	-	DLH
	6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	-	-	-	Dinas Pertanian
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	-	-	-
6.5.1 (b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi		6.5.1 (b) Jumlah stasiun BPDAS hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	6.5.1 (b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	6.5.1 (b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	-	-	-	DLH
6.5.1 (c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk		6.5.1 (c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	6.5.1 (c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	6.5.1 (c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	-	-	-	Dinas Pertanian
6.5.1 (d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara		6.5.1 (d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	6.5.1 (d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	6.5.1 (d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara	-	-	-	-

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.5.1 (e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	6.5.1 (e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	-	-	-	DLH
	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	-	-	-	DLH
	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	-	-	-	Dinas Pertanian
	6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	6.5.1 (h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	-	-	-	DLH
	6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	6.5.1 (i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	-	-	-	DLH
	6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	6.6.1 (a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	-	-	-	DLH
	6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	6.6.1 (b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	-	-	-	DLH
	6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	6.6.1 (c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	-	-	-	DLH
	6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	6.6.1 (d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	-	-	-	DLH
	6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	6.6.1 (e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	-	-	-	DLH

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018		2019
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	48,06	57,11	65,75	70,28	Dinas Perkim
	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	-	-	-	-	Dinas Perkim
	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	-	-	-	-	Dinas Perkim
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	27,41	27,26	28,36	31,13	Dinas Perhubungan
	11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	11.2.1 (b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).					BPBD
	Tanah longsor			0,69	0,69	0,69	0,69	
	Gempa bumi			0,73	0,73	0,73	0,73	
	Kebakaran hutan			0,36	0,36	0,36	0,36	
	Angin puting beliung			0,59	0,59	0,59	0,59	
	Kekeringan Banjir			0,38 0,69	0,38 0,69	0,38 0,69	0,38 0,69	
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	11.5.1 (b) Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	-	-	1	2	2	BPBD

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	11.5.1 (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	-	-	-	-	BPBD
	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	6,00	13,30	37,60	8,92	DLH
	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	11.6.1 (b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	-	-	-	-	DLH

TUJUAN 12. POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	
12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU		12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	-	-	-	DLH
12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	-	-	-	DLH
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	-	-	-	DLH
12.7. Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister		12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	-	-	-	DLH
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	-	-	Sekretariat Daerah

TUJUAN 13. PERUBAHAN IKLIM

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana					
				2016	2017	2018	2019						
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	-	-	-	-	BPBD					
				Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	-	-	-						
				Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	-	-	-						
				Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API),	-	-	-						
				Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	-	1	1		1				
				Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	1	1	1		1				
				13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,98		1,46	1,21	1,20	BPBD	
				13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	13.2.1 Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia		-	-	-	-	BPBD
									13.2.1(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	13.2.1(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	-	-	

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUT

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	14.2.1.(a) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	-	-	-	Diskanak
	14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	-	-	-	Diskanak
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	-	-	-	Dinas PUPR
	14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	14.6.1 (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	100,00	100,00	100,00
14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	-	-	-	Diskanak
	14.b.1.(b). Jumlah nelayan yang terlindungi	14.b.1 (b) Jumlah nelayan yang terlindungi	14.b.1.(b). Jumlah nelayan yang terlindungi	8	8	8	Diskanak

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian			Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	-	-	-	Dinas PUPR
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya	15.2.1 (a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya	-	-	-	DLH
	15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	15.2.1 (b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	-	-	-	DLH
	15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	15.2.1 (c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	-	-	-	DLH
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan pengurangan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena pengurangan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.2.1 (d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	DLH
	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	-	-	-	DLH
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	-	-	-	DLH
	15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.7.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	-	-	-

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
	15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	15.7.1 (b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi	15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	-	-	-	-	DLH
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikannya atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	15.8.1 (a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	-	-	-	-	DLH
15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.c.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.c.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	-	-	-	-	DLH

Pilar 4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	NA	NA	NA	9	Polres OKU Selatan
	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	16.1.2 (a) Persentase desa/kelurahan yang ada kejadian konflik massal selama setahun terakhir	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	-	-	-	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	16.1.3 (a) Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0,0427	0,0334	0,0393	0,0347	Polres OKU Selatan
16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyimpangan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	-	-	-	Inspektorat Kabupaten
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	25,68	31,62	32,98	30,61	BPKAD
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	C	CC	B	B	Sekretariat Daerah
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	75,39	87,72	Sekretariat Daerah/UJLPBJ

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	-	-	-	Inspektorat Kabupaten	
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	-	-	-	Inspektorat Kabupaten	
	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	10,00	10,00	10,00	12,50	Sekretariat DPRD	
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	12,90	12,90	12,90	16,13	BKPSDM	
	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	
	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	67,23	75,87	87,76	88,78	Dinas Admiduk Capil	
	16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	85,63	71,03	87,76	98,78	Dinas Admiduk Capil	

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019		
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					Dinas Kominfo	
				Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik					
				Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik					
				Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik					
				Peningkatan kewajiban layanan informasi publik					
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan	16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	16.10.2 (b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.	16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	0	0	0	0	Dinas Kominfo	
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	16.10.2 (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	Dinas Kominfo	